

Katalog: 817203001



**ANALISIS  
HASIL SE2016  
LANJUTAN**

*KERAJINAN KULIT KERANG KHAS MALUKU*

**POTENSI  
PENINGKATAN  
KINERJA USAHA  
MIKRO KECIL  
PROVINSI MALUKU**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU**

# **Analisis Hasil SE2016 Lanjutan “Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil” Provinsi Maluku**

**ISBN** : 978-602-6701-54-1

**No. Publikasi** : 81550.1905

**Katalog** : 817203001

**Ukuran Buku** : 17,6 cm x 25 cm

**Jumlah Halaman** : xvii + 114 Halaman

**Naskah :**

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor

**Gambar Kulit :**

Seksi Integrasi Pengolahan Data

**Diterbitkan Oleh :**

© Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

**Dicetak Oleh :**

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau Menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

Drs. Dumangar Hutauruk, M.Si

### **Penanggungjawab**

Erhard V. Hatulesila, SE., MM

Ir. Jessica E. Pupella, M.Si

### **Pemeriksa**

Herthy D. Soumokil, SST

### **Penulis**

Arnelia Palijama, S.Si

### **Pengolah Data**

Arnelia Palijama, S.Si

### **Kontributor Data**

Sekretariat SE2016



# Kata Pengantar



**K**egiatan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar Sensus Ekonomi 2016 (UMK dan UMB SE2016) merupakan salah satu rangkaian kegiatan SE2016 Lanjutan yang dilaksanakan pada tahun 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan usaha/perusahaan secara rinci dan mutakhir menurut kategori lapangan usaha pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut antara lain karakteristik usaha, karakteristik sumber daya manusia, level produksi, sistem pemasaran, sistem kelembagaan usaha, serta struktur biaya dan neraca.

Dari berbagai informasi yang dihimpun pada SE2016 Lanjutan, dapat disusun analisis dari berbagai aspek baik tentang UMK maupun UMB. Publikasi Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Maluku ditujukan untuk mengevaluasi sejauh mana UMK di Maluku mampu mendongkrak perekonomian daerah. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mampu mendongkrak perekonomian sekaligus meningkatkan daya saing Maluku di tingkat nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada segenap penggunaannya.

Ambon, Agustus 2019  
BPS Provinsi Maluku  
Kepala,

**Drs. Dumangar Hutauruk, M.Si**

<https://maluku.bps.go.id>

# Kategori Cakupan Sensus Ekonomi 2016

- Kategori B : Pertambangan dan Penggalian
- Kategori C : Industri Pengolahan
- Kategori D : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
- Kategori E : Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi
- Kategori F : Konstruksi
- Kategori G : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor
- Kategori H : Pengangkutan dan Pergudangan
- Kategori I : Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
- Kategori J : Informasi dan Komunikasi
- Kategori K : Aktivitas Keuangan dan Asuransi
- Kategori L : Real Estate
- Kategori M : Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
- Kategori N : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
- Kategori P : Pendidikan
- Kategori Q : Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
- Kategori R : Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
- Kategori S : Aktivitas Jasa Lainnya
- Kategori U : Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

<https://maluku.bps.go.id>

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Lampiran</b>	<b>xv</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	1
Tujuan Analisis	3
Metode Analisis	3
Sistematika Penulisan	3
<b>Bab 1</b>	<b>4</b>
<b>UMK sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan EKonomi</b>	
1. UMK sebagai Penggerak Roda Perekonomian	5
2. UMK sebagai Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak	8
3. UMK di Era Globalisasi	9
<b>Bab 2</b>	<b>12</b>
<b>Bagaimana dan Siapa Pelaku UMK di Maluku</b>	
1. Sektor Perdagangan Mendominasi Jumlah UMK	13
2. Mayoritas UMK Tidak Berbadan Hukum	14
3. Penggunaan Teknologi Informasi yang Minim	17
4. UMK Minim Menjalin Kemitraan	19
5. Mayoritas UMK di Maluku dibantu Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	21
6. Pengusaha UMK Perempuan Mencapai Lebih Dari Sepertiga	22
7. Lebih Dari Setengah Pelaku UMK Hanya Berpendidikan sampai SMP	23

8. Pengeluaran dan Pendapatan UMK	24
9. Pengeluaran dan Pendapatan UMK	26
<b>Bab 3</b>	<b>30</b>
<b>Aksesibilitas Permodalan UMK</b>	
1. UMK Minim Akses terhadap Lembaga Keuangan	31
2. Peluang UMK mendapatkan Akses Permodalan Terhadap Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank Serta Determinannya	34
<b>Bab 4</b>	<b>40</b>
<b>Kinerja Usaha UMK</b>	
1. Kondisi UMK menurut Laba yang Diperoleh	41
2. Kinerja UMK Menurut Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan	43
3. Hubungan Kemitraan dengan Kondisi Laba	46
4. Hubungan Penggunaan Komputer dengan Kondisi Laba	46
5. Hubungan Penggunaan Internet dengan Kondisi Laba	47
<b>Bab 5</b>	<b>48</b>
<b>Prospek Usaha UMK</b>	
1. Prospek UMK di Masa Mendatang	49
2. Permodalan dan Adanya Pesaing Menjadi Kendala Utama UMK dalam Mengembangkan Bisnis	52
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UMK Lebih Prospektif	54
<b>Bab 6</b>	<b>56</b>
<b>Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan</b>	
1. Kesimpulan	57
2. Rekomendasi Kebijakan	59

**Daftar Pustaka** 61

**Catatan Teknis** 63

**Lampiran** 83

Daftar Gambar

<https://maluku.bps.go.id>

# Daftar Tabel

Gambar 1.1	Kontribusi PDB UMK, 2013 .....	5
Gambar 1.2	Pertumbuhan PDB UMK dan UMB, 2009-2013 .....	6
Gambar 1.3	Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Beroperasi di Provinsi Maluku, 2017 .....	7
Gambar 1.4	Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan di Provinsi Maluku, 2017 .....	8
Gambar 1.5	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Usaha di Provinsi Maluku, 2017 .....	9
Gambar 1.6	Pertumbuhan PDB UMK, UMB dan Total, 2001-2013 .....	10
Gambar 2.1	Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017 .....	13
Gambar 2.2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017 .....	14
Gambar 2.3	Persentase UMK Nonpertanian Menurut Jenis Badan Hukum di Provinsi Maluku, 2017 .....	15
Gambar 2.4	Persentase UMK Nonpertanian Nonpertanian yang Memiliki Badan Usaha Menurut Keberadaan Laporan Keuangan di Provinsi Maluku, 2016 .....	16
Gambar 2.5	Persentase Penggunaan Komputer dan Internet pada UMK Nonpertanian di Provinsi Maluku, 2016 .....	20
Gambar 2.6	Persentase UMK Nonpertanian yang Memanfaatkan Internet Menurut Tujuan Penggunaannya di Provinsi Maluku, 2016 .....	20
Gambar 2.7	Persentase UMK Nonpertanian yang Menjalinkan Kemitraan Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2016 .....	21
Gambar 2.8	Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2017 .....	24
Gambar 2.9	Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan di Provinsi Maluku, 2017 .....	24
Gambar 2.10	Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian yang Pekerjanya Pernah/Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan di Provinsi Maluku, 2017 .....	25
Gambar 2.11	Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian yang Pernah Mengikutsertakan Pekerja Dalam Pelatihan Menurut Jenis Pelatihan di Provinsi Maluku, 2017 .....	25
Gambar 2.12	Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian yang Pekerjanya Pernah/Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan menurut Penyelenggara pelatihan di Provinsi Maluku, 2017 .....	25

Gambar 3.1	Persentase UMK Nonpertanian Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan di Provinsi Maluku, 2016 .....	32
Gambar 3.2	Persentase UMK yang Tidak Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya di Provinsi Maluku, 2016 .....	33
Gambar 3.3	Persentase UMK yang Mempunyai Akses ke Lembaga Keuangan menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2016 .....	33
Gambar 3.4	Persentase Akses UMK ke Lembaga Keuangan menurut Lokasi Usaha di Provinsi Maluku, 2016 .....	34
Gambar 3.5	Persentase Akses UMK Nonpertanian ke Lembaga Keuangan menurut Skala Usaha di Provinsi Maluku, 2016 .....	37
Gambar 3.6	Persentase Akses terhadap Lembaga Keuangan Menurut Lama Usaha di Provinsi Maluku, 2016 .....	38
Gambar 3.7	Persentase Akses UMK ke Lembaga Keuangan menurut Status Badan Usaha di Provinsi Maluku, 2017 .....	38
Gambar 3.8	Persentase Akses UMK ke Lembaga Keuangan menurut Penggunaan Internet di Provinsi Maluku, 2016 .....	39
Gambar 4.1	Persentase UMK Menurut Kondisi Laba 2016 Dibanding 2015 di Provinsi Maluku .....	41
Gambar 4.2	Persentase UMK yang mengalami Kenaikan Laba Usaha di Provinsi Maluku, 2016 .....	42
Gambar 4.3	Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017 .....	44
Gambar 4.4	Persentase Kondisi Laba UMK Nonpertanian di Provinsi Maluku Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 menurut Penggunaan Komputer .....	46
Gambar 5.1	Persentase UMK Nonpertanian menurut Prospek Usaha di Provinsi Maluku, 2017 .....	49
Gambar 5.2	Proporsi UMK Yang Memiliki Prospek Lebih Baik Menurut Kategori, 2017 .....	50
Gambar 5.3a	Persentase UMK Menurut Ada Tidaknya Rencana Pengembangan Bisnis di Provinsi Maluku, 2017 .....	51
Gambar 5.3b	Proporsi UMK menurut Jenis Rencana Pengembangan Bisnis di Provinsi Maluku, 2017 .....	51
Gambar 5.4	Proporsi UMK menurut Alasan Tidak Berencana Melakukan Pengembangan Perusahaan Bisnis di Provinsi Maluku, 2017 .....	51
Gambar 5.5a	Persentase UMK Menurut Ada Tidaknya Kendala yang Dihadapi di Provinsi Maluku, 2016 .....	52
Gambar 5.5b	Persentase UMK di Provinsi Maluku yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen), 2016 .....	52

# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2017 .....	8
Tabel 2.1	Persentase UMK Nonpertanian yang Berbadan Usaha dan Keberadaan Laporan Keuangan Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017 .....	17
Tabel 2.2	Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Sistem Usaha di Provinsi Maluku, 2017 .....	19
Tabel 2.3	Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja di Provinsi Maluku, 2017 .....	23
Tabel 2.4	Persentase Biaya/Pengeluaran UMK menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran selama Setahun di Provinsi Maluku, 2016 .....	26
Tabel 2.5	Persentase Total Pendapatan Usaha/Perusahaan UMK menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pendapatan selama Setahun di Provinsi Maluku, 2016 .....	27
Tabel 3.1	Jumlah Rekening UMK yang Menerima Kredit di Provinsi Maluku Tahun 2012-2016 .....	31
Tabel 3.2	Persentase Akses terhadap Lembaga Keuangan menurut Keanggotaan Koperasi, Keanggotaan Asosiasi dan Kemitraan UMK dengan Usaha/Perusahaan Lain di Provinsi Maluku, 2016 .....	35
Tabel 3.3	Jumlah UMK menurut Komposisi Permodalan pada Awal Pendirian dan Saat Pencacahan .....	36
Tabel 4.1	Sebaran UMK menurut Kinerja Keuangan Tertinggi dan Terendah di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2016 .....	43
Tabel 4.2	Rata - Rata Balas Jasa dan Upah per Pekerja Dibayar UMK Nonpertanian menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2016 .....	45
Tabel 4.3	Persentase Kondisi Laba UMK Nonpertanian di Provinsi Maluku Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 menurut Penggunaan Komputer .....	47
Tabel 4.4	Persentase Kondisi Laba UMK Nonpertanian Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 menurut Penggunaan Internet di Provinsi Maluku .....	47
Tabel 5.1	Proporsi UMK yang Menyatakan Adanya Pesaing dan Adanya Kendala Permodalan/Likuiditas Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017 .....	53
Tabel 5.2	Tabel Odds Ratio Hasil Estimasi Model Prospek Usaha UMK .....	54

# Daftar Lampiran

Lampiran 1	Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial Usaha/Perusahaan di Provinsi Maluku .....	83
Lampiran 2	Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Provinsi Maluku, 2017 .....	84
Lampiran 3	Banyaknya Pekerja UMK menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Provinsi Maluku, 2017.....	88
Lampiran 4	Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Badan Hukum di Provinsi Maluku, 2017.....	92
Lampiran 5	Banyaknya UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Sistem Usaha di Provinsi Maluku, 2017.....	95
Lampiran 6	Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Komputer di Provinsi Maluku, 2016 .....	97
Lampiran 7	Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kemitraan .....	98
Lampiran 8	Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Perolehan Laba Tahun 2016 Dibandingkan Tahun 2015 di Provinsi Maluku .....	101
Lampiran 9	Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kemitraan di Provinsi Maluku, 2016 .....	103
Lampiran 10	Banyaknya UMK dan Pekerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2017 .....	106
Lampiran 11	Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerja di Provinsi Maluku, 2017 .....	107
Lampiran 12	Banyaknya Pengusaha UMK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2017 .....	109
Lampiran 13	Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pengusaha/Penanggungjawab di Provinsi Maluku, 2017 .....	110
Lampiran 14	Banyaknya UMK yang Pekerjanya Pernah/ Sedang Mengikuti Pelatihan/ Penyuluhan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pelatihan di Provinsi Maluku, 2017 .....	113
Lampiran 15	Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan di Provinsi Maluku, 2017 .....	115
Lampiran 16	Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan di Provinsi Maluku, 2016 .....	118
Lampiran 17	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku (Persen), 2015-2018 .....	121
Lampiran 18	Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Prospek Usaha/Perusahaan pada Tahun 2018 di Provinsi Maluku .....	122

Lampiran 19	Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Rencana Pengembangan/Perluasan Usaha/Perusahaan di Provinsi Maluku, 2017 .....	124
Lampiran 20	Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Alasan Utama Tidak Mempunyai Rencana Pengembangan/Perluasan Usaha/Perusahaan di Provinsi Maluku, 2017 .....	127
Lampiran 21	Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kendala Usaha/Perusahaan di Provinsi Maluku, 2016 .....	130
Lampiran 22	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Maluku (Persen), 2015-2018 .....	135

# Pendahuluan

## 1. Latar Belakang

Dunia usaha Maluku pada saat ini masih didominasi oleh usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil (UMK). Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMK khusus kategori industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1-4 orang tenaga kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, 5-19 orang tenaga kerja sebagai usaha kecil, 20-99 orang tenaga kerja sebagai usaha menengah,  $\geq 100$  orang sebagai usaha besar. Khusus untuk usaha kategori Konstruksi yang memiliki nilai proyek sampai dengan 1,75 milyar dikelompokkan sebagai UMK, sedangkan kategori lainnya dikelompokkan berdasarkan omset  $\leq 2,5$  milyar dan berbadan usaha selain PT/PT Persero/Perum.

Berdasarkan hasil SE2016, jumlah UMK di mencapai hampir 150 ribu usaha atau 99,94 persen dari total usaha nonpertanian di Maluku. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Maluku lebih dari 321 ribu orang atau sekitar 96,99 persen dari total tenaga kerja di Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa UMK lebih diminati karena adanya beberapa keunggulan dibanding UMB, salah satunya kemampuan bertahan dari krisis global. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 2006, UMK terbukti lebih mampu bertahan dibanding usaha-usaha besar lainnya.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis diungkapkan oleh CIDES (Center for Information and Development Studies) dalam artikel "Dampak Kenaikan Harga BBM pada sektor UKM di Indonesia" (Meryana, 2012). Menurut CIDES terdapat tiga keunggulan UMK. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dialami oleh Jepang pasca luluh lantah oleh bom atom pada Perang Dunia II, dengan memperkuat sektor riil yang digerakkan

oleh usaha kecil dan menengah. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Sementara keunggulan ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal sendiri atau tidak ditopang pinjaman dari bank. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini belum mampu untuk berkembang lebih cepat. LPPI dan BI (2015) menjabarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minim akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan SDM yang masih rendah sehingga di kelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia tidak terkecuali di Maluku, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar yang ada. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumber daya alam maupun padat tenaga kerja. Usaha tersebut umumnya tercakup pada Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan serta Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Menurut LPPI dan BI (2015) sumbangan kedua sektor ini dalam nilai tambah UMK sebesar 77,68 persen. Namun demikian, sektor-sektor lainnya juga mampu menyumbang yang tidak sedikit pada perekonomian UMK.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK di Provinsi Maluku saat ini, serta prospeknya dimasa mendatang, perlu dilakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai UMK secara menyeluruh serta prospek pengembangannya. Informasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi Pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat dan lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

## 2. Tujuan Analisis

Tujuan penulisan untuk tema analisis ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai karakteristik/kualitas sumber daya manusia pada UMK;
2. Memberikan gambaran mengenai kondisi aksesibilitas permodalan dan faktor yang mempengaruhi kemudahan dalam mengakses permodalan;
3. Memberikan gambaran mengenai kinerja usaha dan determinannya yang ditinjau dari probabilitas;
4. Menganalisis prospek usaha berdasarkan pengakuan responden dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
5. Menganalisis potensi yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja UMK;

## 3. Metode Analisis

Analisis Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil menggunakan beberapa metode:

1. Analisis Deskriptif:
  - Menggunakan data-data SE2016 Lanjutan dengan penyajian tabel atau grafik;
  - Menggunakan data-data lain di luar hasil SE2016 untuk memperkaya dan mempertajam analisis;
2. Permodelan:
  - Menggunakan raw data SE2016 Lanjutan;
  - Menggunakan model Analisis *Crosstabs* dan Regresi *Logistic*. Penjelasan masing-masing model dijelaskan pada Bab Catatan Teknis;

## 4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I : UMK sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi;
2. Bab II : Bagaimana dan Siapa Pelaku UMK di Maluku;
3. Bab II : Aksesibilitas Permodalan UMK;
4. Bab IV : Kinerja Usaha UMK;
5. Bab V : Prospek Usaha UMK;
6. Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan;



BAB

1

KERAJINAN KULIT KERANG KHAS MALUKU

<https://ma>

# UMK SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

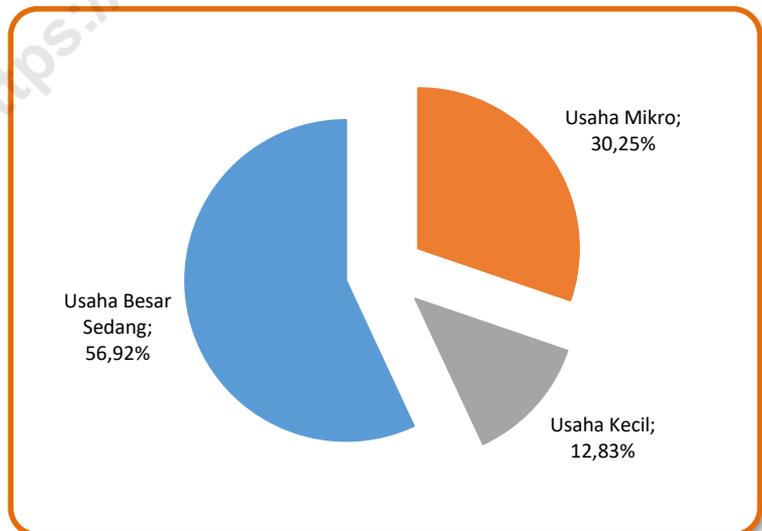


# UMK sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

## 1. UMK sebagai Penggerak Roda Perekonomian

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, diantaranya sebagai sumber kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Peran UMK dalam menciptakan nilai tambah perekonomian Indonesia cukup besar. Peran ini terlihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di atas 40 persen pada tahun 2013 (Gambar 1.1). Walaupun dengan jumlah usaha UMK yang mencapai 99 persen (sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)) dari seluruh usaha di Indonesia pada tahun tersebut, kontribusi PDB UMK masih cukup kecil dibandingkan jumlah usahanya.

**Gambar 1.1. Kontribusi PDB UMK, 2013**



Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

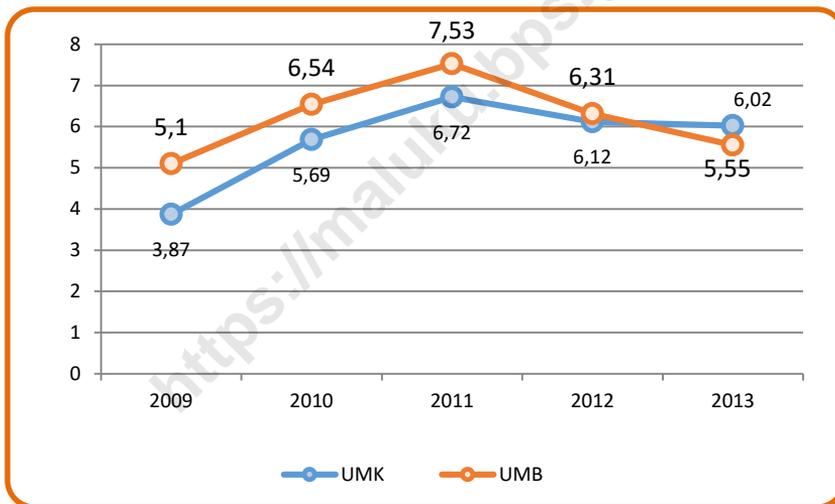
UMK memberikan kontribusi nilai tambah dalam perekonomian Maluku. Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan persentase UMK mencapai 99,15 persen dari total jumlah usaha di Maluku. UMK juga telah menyerap tenaga kerja empat per lima tenaga kerja nonpertanian di Maluku.

Meskipun kontribusi PDBnya masih kecil, namun demikian potensi yang dikandung UMK cukup besar. Selama periode 2009-2013 pertumbuhan PDB UMK terus meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 1.2. menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan PDB UMK selama periode 2009-2013 secara rata-

rata masih di bawah pertumbuhan PDB UMB namun pertumbuhan PDB UMK jauh lebih cepat dibanding UMB dimana pertumbuhan PDB UMK tercatat dari 3,87 persen pada 2009 menjadi 6,02 persen pada 2013 sedangkan PDB UMB hanya meningkat dari 5,1 persen menjadi 5,55 persen.

**Gambar 1.2. Pertumbuhan PDB UMK dan UMB di Indonesia, 2009-2013**

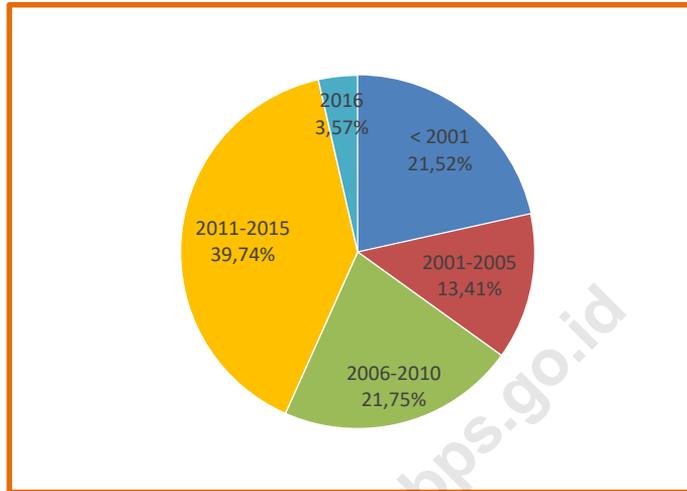


Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

UMK pun mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Maluku. Pengelolaan usaha ini sebagian besar dilakukan secara sederhana dan memerlukan modal yang relatif kecil sehingga lebih diminati sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Ciri lainnya

dari UMK adalah jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, tempat usaha tidak selalu menetap atau sewaktu-waktu dapat berpindah. Oleh sebab itu, mayoritas UMK di Maluku beroperasi secara komersil kurang dari 10 tahun (Gambar 1.3).

**Gambar 1.3. Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Beroperasi di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

Berdasarkan hasil SE2016-Lanjutan, persentase UMK di Maluku mencapai 99,15 persen dari total jumlah usaha nonpertanian di Maluku. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Ambon menjadi pusat pergerakan ekonomi di Maluku. Namun demikian, dari 11 kabupaten/kota, jumlah UMK di Kabupaten Maluku Tengah merupakan yang tertinggi yaitu mencapai 25,50 persen. Kategori usaha yang mendominasi

di Kabupaten Maluku Tengah adalah Kategori G, Kategori C, dan Kategori I. Pada posisi kedua dan ketiga, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan jumlah UMK berturut-turut mencapai 23,79 persen dan 11,72 persen. Kategori usaha yang mendominasi di Kota Ambon adalah kategori G, Kategori I, dan Kategori H. Sementara kategori usaha yang mendominasi di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah kategori G, Kategori C, dan Kategori H.

**Tabel 1.1. Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2017**

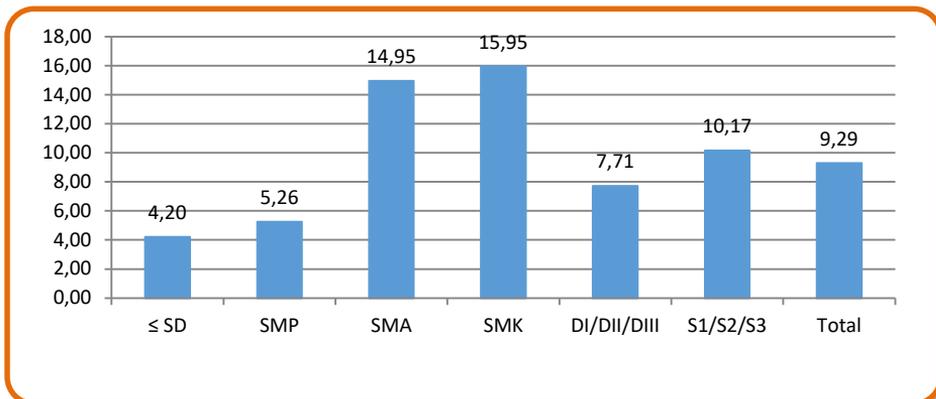
Kabupaten/Kota	Persentase (%)
(1)	(2)
Maluku Tenggara Barat	8,55
Maluku Tenggara	3,42
Maluku Tengah	25,50
Buru	7,90
Kepulauan Aru	3,40
Seram Bagian Barat	11,72
Seram Bagian Timur	4,39
Maluku Barat Daya	4,36
Buru Selatan	3,70
Ambon	23,79
Tual	3,27
<b>Maluku</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## 2. UMK sebagai Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak

Jumlah UMK yang sangat besar di Maluku tentunya akan berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan hasil Sakernas

2017, pengangguran di Maluku mencapai 9,29 persen, terbanyak pada lulusan SMK yang mencapai 15,95 persen (Gambar 1.4).

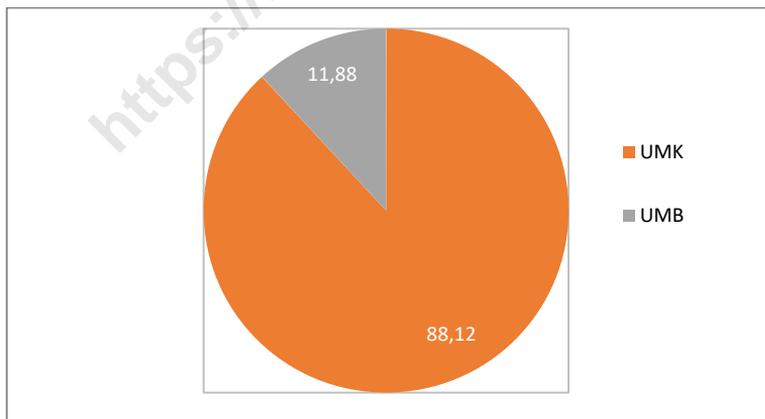
**Gambar 1.4. Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan di Provinsi Maluku, 2017**

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Maluku, Agustus 2017

Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Maluku, salah satu disebabkan rendahnya keahlian (*soft skill*) lulusan pendidikan menengah khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji (Worldbank, 2014). Selain SMK, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan SMA yang mencapai 14,59 persen dan lulusan akademi/diploma. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja yang terdidik.

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah untuk menampung tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Hasil SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap empat per lima tenaga kerja nonpertanian di Maluku, atau mencapai 0,35 juta orang.

**Gambar 1.5. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Usaha di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

### 3. UMK di Era Globalisasi

Berbicara tentang UMK (Totok Harmoyo, 2002), maka akan terbayang dipikirkan bagaimana jerih payah rakyat kecil

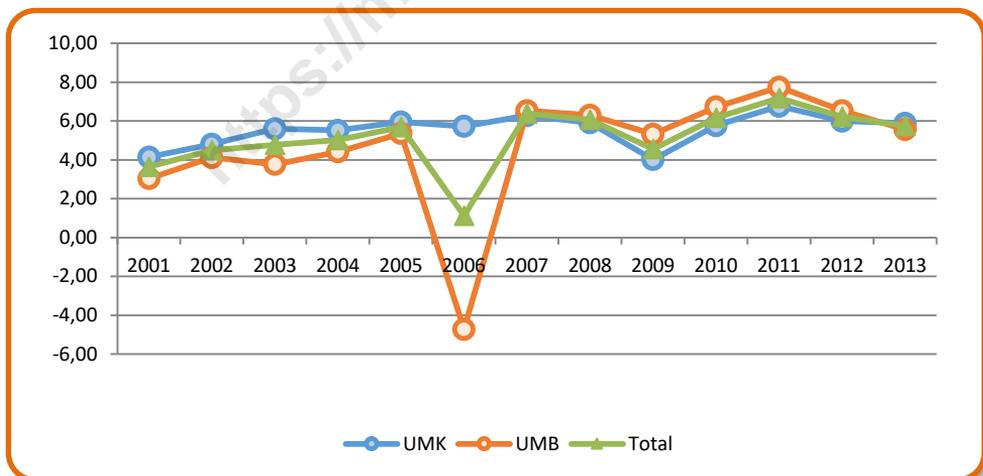
menjalankan roda bisnis dengan tertatih-tatih, dengan dukungan modal yang sangat terbatas, bahkan mungkin

peralatan yang sederhana. Kerja keras itu tidak lain adalah semata-mata untuk mempertahankan hidupnya. Selama ini kedudukan UMK telah teruji dalam menghadapi krisis global yang terjadi baik selama periode 1997-1998 maupun yang terjadi pada tahun 2006. Gambar 1.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 terjadi krisis yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan tersebut disumbang oleh penurunan UMB

sebesar 4,72 persen. Hal ini mengindikasikan adanya ketahanan UMK di masa krisis tersebut.

Pada tahun 2009 kembali terjadi krisis ekonomi dunia, namun efeknya tidak terlalu dirasakan oleh usaha/perusahaan di Indonesia, hal ini dapat terlihat pada gambar dibawah yang menunjukkan PDB baik UMB dan UMK masih mengalami pertumbuhan walaupun pertumbuhannya melambat dibanding tahun sebelumnya.

**Gambar 1.6. Pertumbuhan PDB UMK dan UMB di Indonesia 2001-2013**



Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

<https://maluku.bps.go.id>



BAB

# 2

*KERAJINAN KULIT KERANG KHAS MALUKU*

## **BAGAIMANA DAN SIAPA PELAKU UMK DI MALUKU**

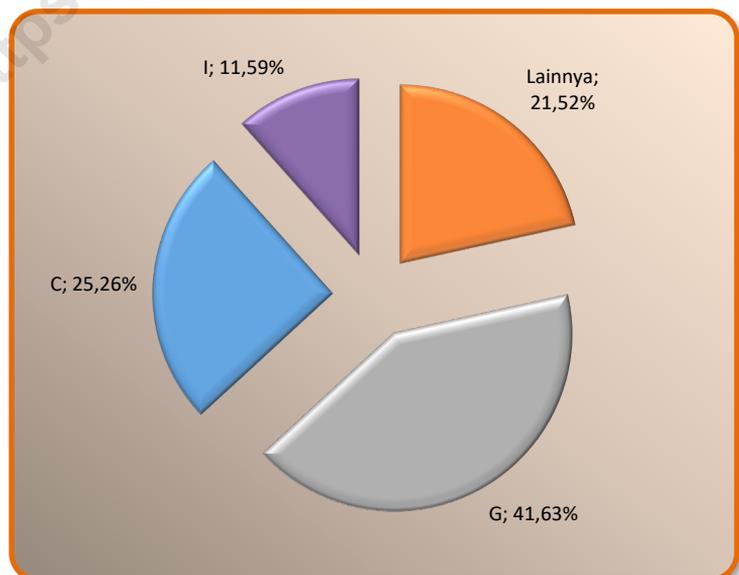


# Bagaimana dan Siapa Pelaku UMK di Maluku

## 1. Sektor Perdagangan Mendominasi Jumlah UMK

Jumlah UMK di Maluku tersebar pada semua kategori nonpertanian. Dari total jumlah UMK di Provinsi Maluku, usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah mencapai 41,63 persen, diikuti usaha Industri Pengolahan (Kategori C) mencapai 25,26 persen, dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dengan jumlah usaha mencapai 11,59 persen, yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku (Gambar 2.1).

**Gambar 2.1. Persentase Jumlah UMK Nonpertanian menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa sektor perdagangan mendominasi jumlah UMK di Maluku mencapai hampir 42 persen.

Sejalan dengan itu penyerapan tenaga kerja paling banyak pada sektor ini, mencapai hampir 35 persen.

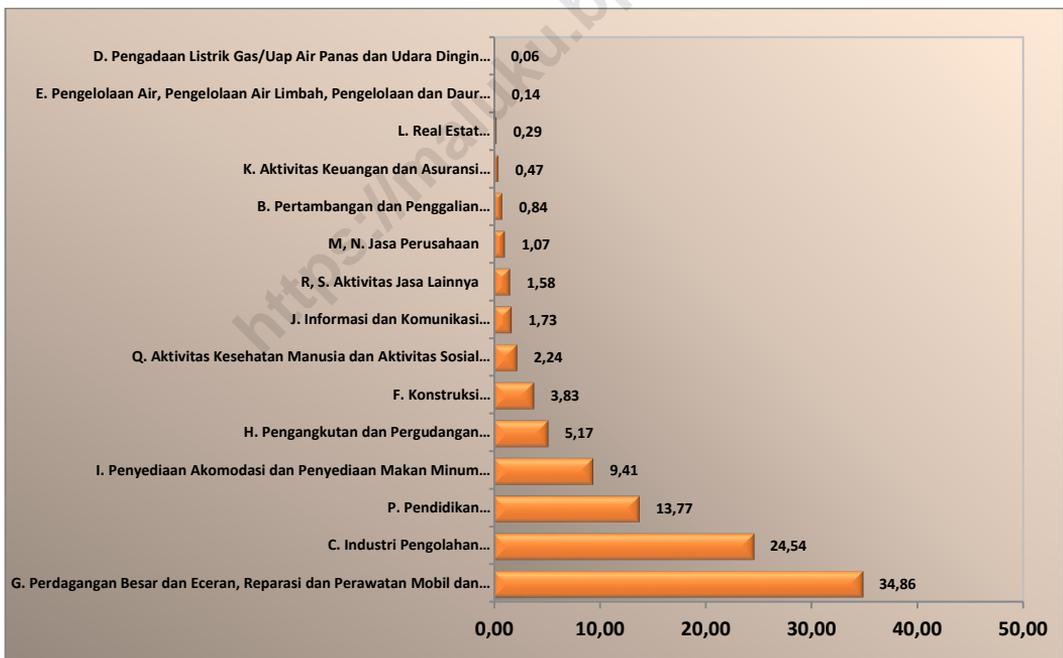
Dari sisi badan hukum, umumnya usaha mikro tidak berbadan hukum.

Sedangkan dari sisi gender, lebih dari sepertiga pelaku usaha adalah perempuan baik sebagai pengusaha maupun pekerja .

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada kategori G, mencapai lebih dari sepertiga dari tenaga kerja pada UMK secara keseluruhan yakni mencapai 34,86 persen (Gambar 2.2). Selanjutnya Usaha Industri Pengolahan (kategori C) dan Usaha Pendidikan (kategori P) menempati urutan kedua dan ketiga

dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK. Secara-rata-rata, UMK kategori Pendidikan (kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 11 pekerja per usaha. Secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Maluku hanya sebesar 2 pekerja per usaha.

**Gambar 2.2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## 2. Mayoritas UMK tidak Berbadan Hukum

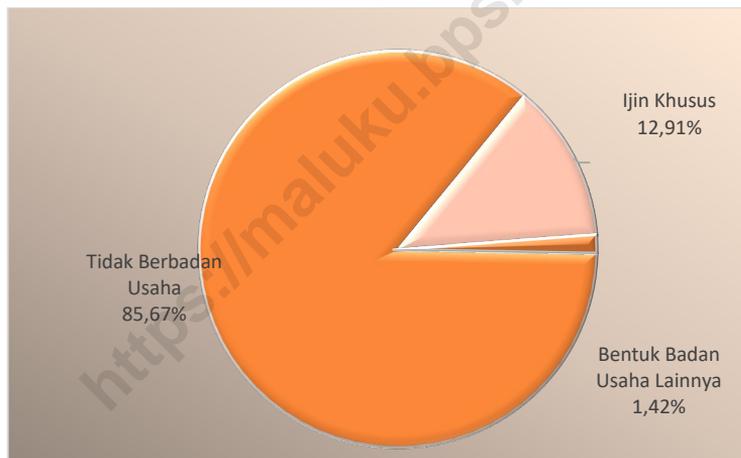
Sebagian besar UMK di Maluku memiliki karakteristik informal dan dikelola secara sederhana, yang sebagian dicirikan

dengan tidak adanya status badan hukum dan tidak adanya sistem pencatatan keuangan. Hasil SE2016 Lanjutan

menunjukkan pengelolaan UMK yang dilakukan secara sederhana, tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan laporan keuangannya, dan umumnya tidak memiliki izin usaha. Hasil SE2016-Lanjutan mencatat jumlah UMK di Maluku yang tidak berbadan usaha masih sangat dominan, yaitu mencapai 85,67 persen. UMK yang mempunyai badan usaha hanya

1,42 persen, dan merupakan usaha yang tidak berbadan hukum namun mempunyai izin khusus dari instansi maupun dari pemerintah kabupaten/kota yang mencapai 12,91 persen. UMK yang berbadan hukum di sektor Pendidikan (Kategori P) dan Konstruksi (Kategori F) mempunyai persentase tertinggi di antara sektor lainnya (Tabel 2.1).

**Gambar 2.3. Persentase UMK Nonpertanian Menurut Jenis Badan Hukum di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

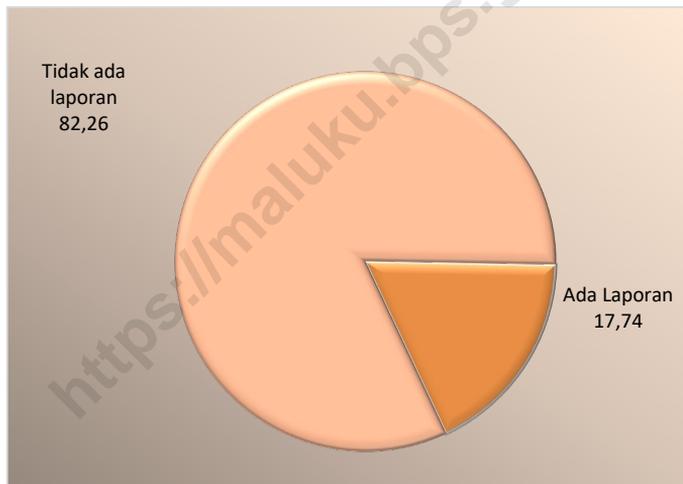
Sementara itu, laporan keuangan sebagai salah satu faktor yang sangat mendasar bagi pengelolaan bisnis dan usaha masih sedikit yang dilakukan oleh UMK. Dari sekitar 2,09 ribu UMK yang berbadan usaha, sekitar 4 persen UMK yang melakukan pencatatan laporan keuangan. Suatu usaha yang dijalankan tanpa laporan keuangan akan menyulitkan

dalam penilaian kinerja. Laporan keuangan sangat penting, yaitu sebagai indikator penilaian kemajuan perusahaan secara keseluruhan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu laporan keuangan juga sebagai alat evaluasi dan perencanaan terkait kebijakan yang akan diambil pengelola bisnis atau usaha untuk

meningkatkan kinerjanya. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa laporan keuangan merupakan salah satu syarat bagi UMK untuk mengajukan kredit pada lembaga keuangan formal. Tentunya lembaga keuangan formal akan melihat kondisi keuangan UMK melalui laporan

keuangannya sebelum memberikan kredit (*Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2013*). UMK yang berbadan usaha dan memiliki laporan keuangan mencapai 17,74 persen. Sedangkan UMK yang berbadan usaha tetapi tidak memiliki laporan keuangan mencapai 82,26 persen.

**Gambar 2.4. Persentase UMK Nonpertanian yang Memiliki Badan Usaha menurut Keberadaan Laporan Keuangan di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

Dirinci menurut lapangan usaha, UMK yang mempunyai laporan keuangan di sektor Pendidikan (Kategori P); dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

(Kategori G) mempunyai persentase tertinggi diantara sektor lainnya yaitu sebesar 57,85 persen dan 18,08 persen (Tabel 2.1).

**Tabel 2.1. Persentase UMK Nonpertanian yang Berbadan Usaha dan Keberadaan Laporan Keuangan Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017**

Kategori	Berbadan Usaha	Adanya Laporan Keuangan
(1)	(2)	(3)
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	2,92	4,15
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	27,00	0,16
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	13,27	0,21
F. Konstruksi	18,61	0,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	17,16	18,08
H. Pengangkutan dan Pergudangan	11,49	3,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	10,53	7,43
J. Informasi dan Komunikasi	4,46	0,16
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	55,92	0,69
L. Real Estat	4,12	0,00
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis; dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	36,98	2,69
P. Pendidikan	86,06	57,85
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	47,94	2,66
R,S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi; dan Aktivitas Jasa Lainnya	23,40	2,58
<b>Total</b>	<b>14,33</b>	<b>17,74</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

### 3. Mayoritas UMK Memiliki Sistem Usaha Konvensional

Hasil SE2016-Lanjutan mencatat 98,83 persen UMK di Maluku bersistem usaha konvensional. UMK yang memiliki sistem usaha waralaba hanya 0,42 persen. UMK dengan sistem usaha multi level marketing

dan konsinyasi berturut-turut sebesar 0,33 persen dan 042 persen.

UMK yang bergerak pada sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Kategori K); sektor Real Estat (Kategori L); serta sektor Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N); mempunyai persentase tertinggi di antara sektor lainnya yang memiliki sistem usaha konvensional. Sementara UMK sektor

Pengelolaan Air, Pengelolaan Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi (Kategori E) mempunyai persentase tertinggi bersistem usaha waralaba. Selanjutnya UMK sektor Konstruksi (Kategori F) yang mempunyai persentase tertinggi bersistem usaha *multi level marketing*. Kemudian UMK sektor Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (Kategori D) yang memiliki persentase tertinggi bersistem usaha konsinyasi.

**Tabel 2.2. Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Sistem Usaha di Provinsi Maluku, 2017**

Kategori	Waralaba	Multi Level Marketing	Konsinyasi	Konvensional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,73	99,27
C. Industri Pengolahan	0,44	0,33	0,76	98,46
D. Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1,00	0,00	3,00	96,00
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1,70	0,00	0,00	98,30
F. Konstruksi	0,29	1,44	0,86	97,42
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0,48	0,27	0,25	99,01
H. Pengangkutan dan Pergudangan	0,31	0,26	0,18	99,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan	0,37	0,42	0,13	99,08

Kategori (1)	Waralaba (2)	Multi Level Marketing (3)	Konsinyasi (4)	Konvensional (5)
Makan Minum				
J. Informasi dan Komunikasi	0,00	0,97	0,69	98,35
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0,00	0,00	0,00	100,00
L. Real Estat	0,00	0,00	0,00	100,00
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis;	0,00	0,98	0,49	98,54
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;	0,00	0,00	0,00	100,00
P. Pendidikan	0,75	0,56	1,47	97,23
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1,07	0,00	0,00	98,93
R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;	0,00	0,00	1,84	98,16
S. Aktivitas Jasa Lainnya	0,49	0,28	0,00	99,23
<b>Total</b>	<b>0,42</b>	<b>0,33</b>	<b>0,42</b>	<b>98,83</b>

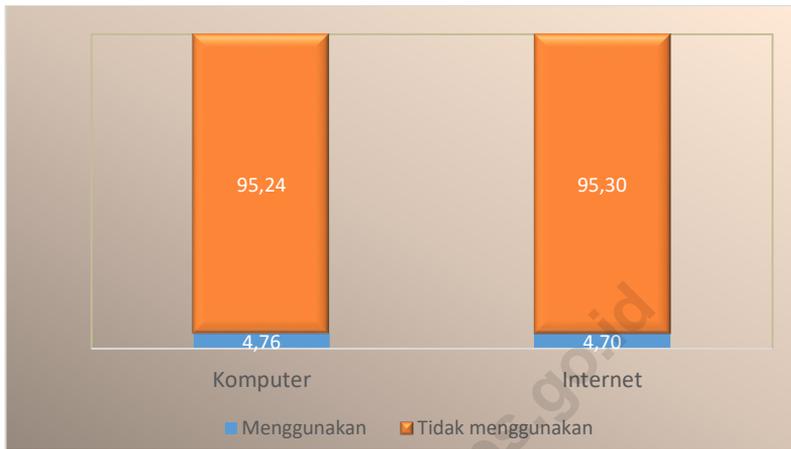
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

#### 4. Penggunaan Teknologi Informasi yang Minim

Pada era digital ini, teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan UMK di Indonesia tidak terkecuali dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Teknologi informasi meliputi penggunaan komputer dan internet. Namun dari hasil SE2016 lanjutan menunjukkan jika mayoritas UMK belum menggunakan komputer dan

memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk membuat laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, hanya mencapai 4,76 persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet sebesar 4,70 persen (Gambar 2.5).

**Gambar 2.5. Persentase Penggunaan Komputer dan Internet pada UMK Nonpertanian di Provinsi Maluku, 2016**

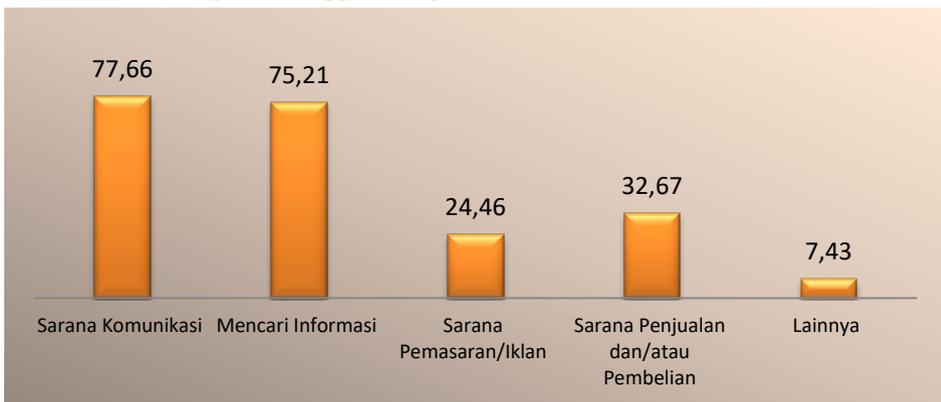


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Para pelaku UMK pada era 4.0 harus dapat melihat peluang digital dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga mampu menyasar pasar yang lebih luas. Jika pada saat ini Maluku tidak memanfaatkan teknologi digital dalam

usaha, maka kedepannya akan diserang bukan saja oleh produk nasional dari daerah lain tapi juga oleh produk dari luar negeri mengakibatkan UMK Maluku akan terus tertinggal dan sulit untuk mengembangkan usahanya.

**Gambar 2.6. Persentase UMK Nonpertanian yang Memanfaatkan Internet Menurut Tujuan Penggunaannya di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

UMK yang telah menggunakan internet, mencapai 32,67 persen pemanfaatannya untuk menjual/membeli barang/jasa. Bahkan internet juga telah dimanfaatkan untuk pemasaran/iklan, yaitu untuk memperkenalkan produk/jasa dan menggambarkan spesifikasi produk/ jasa

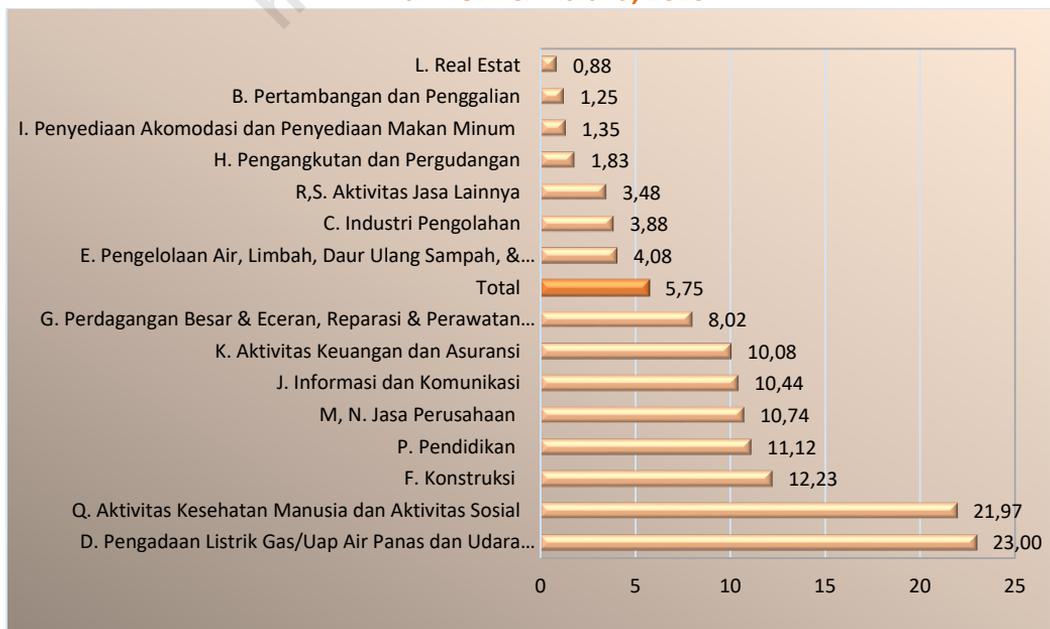
sebesar 24,46 persen. Dalam perkembangan industri digital dewasa ini, diharapkan lebih banyak UMK yang dapat memanfaatkan internet terutama untuk pemasaran agar dapat meningkatkan daya saingnya.

### 5. UMK Minim Menjalin Kemitraan

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan juga menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi

menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar hampir 6 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

**Gambar 2.7. Persentase UMK Nonpertanian yang Menjalin Kemitraan Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Meskipun kemitraan akan sangat berdampak positif bagi UMK, perwujudannya masih sangat minim. Hanya mencapai 5,75 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan

dengan perusahaan besar. UMK Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin seperti PLN dan Usaha/Perusahaan Es Balok, persentasenya paling tinggi dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain (Gambar 2.7).

## 6. Mayoritas UMK di Maluku Dibantu Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, dengan ciri khas UMK di Maluku yang mayoritas masih dikelola dengan sederhana, umumnya usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan sederhana, maka seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha.

Selain itu, cukup banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016 Lanjutan menunjukkan hampir 28 persen UMK di Maluku dilakukan oleh buruh yang tidak dibayar.

Tingkat keterampilan pekerja UMK tentunya bervariasi antar sektor. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G); Industri Pengolahan (Kategori C) merupakan kategori yang paling banyak dibantu pekerja tidak dibayar. Kedua aktivitas ini paling banyak dilakukan oleh pelaku UMK, seperti warung/rumah makan, usaha perdagangan skala rumahan, bengkel, dan toko/kios alat motor; industri makanan seperti kue/roti, kopra, pengolahan dan pembekuan ikan; industri minuman seperti sopi (minuman beralkohol khas Maluku); industri kimia minyak atsiri seperti minyak kayu putih.

**Tabel 2.3. Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja di Provinsi Maluku, 2017**

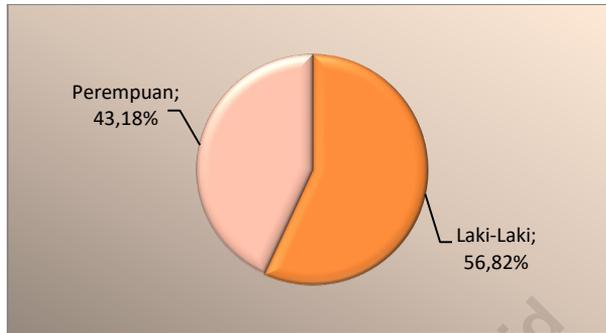
Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/ Harian/ Outsourcing	Tidak Dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	71,83	2,33	25,84
C. Industri Pengolahan	49,36	13,60	37,04
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	67,79	0,00	32,21
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	81,26	5,09	13,65
F. Konstruksi	31,21	66,60	2,19
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	57,13	2,99	39,88
H. Pengangkutan dan Pergudangan	88,09	7,18	4,73
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	64,76	4,87	30,37
J. Informasi dan Komunikasi	69,87	1,37	28,77
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	93,51	0,12	6,37
L. Real Estat	71,68	0,59	27,72
M, N. Jasa Perusahaan	68,85	14,70	16,45
P. Pendidikan	92,50	6,43	1,07
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	95,54	2,50	1,96
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	76,90	7,91	15,20
<b>Total</b>	<b>63,32</b>	<b>9,03</b>	<b>27,65</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## 7. Pengusaha UMK Perempuan Mencapai Lebih dari Sepertiga

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai tenaga kerja maupun pengusaha. Persentase pengusaha UMK di Maluku yang berjenis kelamin perempuan mencapai 43,18 persen.

**Gambar 2.8. Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2017**

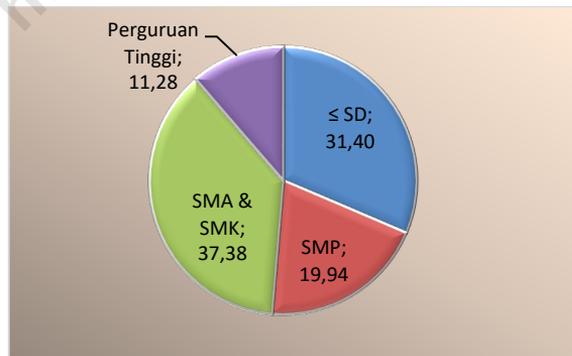


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

### 8. Lebih Dari Setengah Pelaku UMK Hanya Berpendidikan sampai SMP

Secara umum kualitas pendidikan berpendidikan SMA, paling besar diantara pengelola UMK masih rendah. Hasil jenjang pendidikan lainnya. Pengelola SE2016 Lanjutan menunjukkan bahwa dengan pendidikan SD ke bawah juga lebih dari sepertiga pengelola cukup besar hampir mencapai sepertiga.

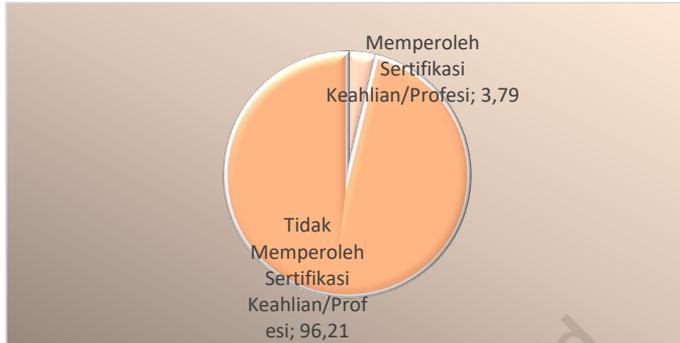
**Gambar 2.9. Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk berupaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan berwirausaha, seperti melakukan pelatihan, membuka jaringan pasar atau membantu pengusaha memperluas *market place* dan lain sebagainya.

**Gambar 2.10. Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian yang Pekerjaanya Pernah/Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan di Provinsi Maluku, 2017**

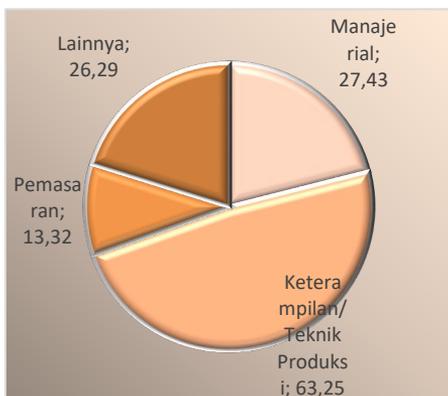


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Pelatihan kerja merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan kerja. Sayangnya, hanya sedikit UMK yang pernah mengikutsertakan SDM nya dalam pelatihan, yaitu mencapai 3,79 persen (Gambar 2.9). Dari sejumlah UMK

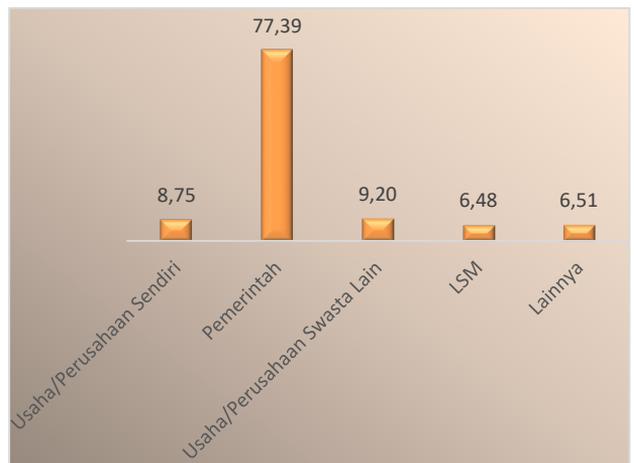
tersebut, jenis pelatihan terbanyak yang diikuti adalah keterampilan teknik produksi (Gambar 2.10). Sementara penyelenggara pelatihan, sebagian besar diadakan oleh pemerintah (Gambar 2.11).

**Gambar 2.11. Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian yang Pernah Mengikutsertakan Pekerja Dalam Pelatihan Menurut Jenis Pelatihan di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

**Gambar 2.12. Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian yang Pekerjaanya Pernah/Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan menurut Penyelenggara pelatihan di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

## 9. Pengeluaran dan Pendapatan UMK

Hasil SE2016 Lanjutan menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran usaha/perusahaan UMK digunakan untuk pengeluaran khusus, yakni mencapai 53,87 persen. Informasi dan Komunikasi (Kategori J); Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Kategori K); Industri Pengolahan (Kategori C); Penyediaan AKomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I); Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin (Kategori E); Pendidikan (Kategori P); Konstruksi (Kategori F); Jasa

Perusahaan (M,N); Aktivitas Jasa Lainnya (Kategori R,S); serta Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Kategori Q) merupakan kategori-kategori yang sebagian besar pengeluaran usaha/perusahaan digunakan untuk pengeluaran khusus. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) merupakan satu-satunya kategori yang tidak mempunyai pengeluaran khusus.

**Tabel 2.4. Persentase Biaya/Pengeluaran UMK menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran selama Setahun di Provinsi Maluku, 2016**

Lapangan Usaha	Pengeluaran Umum	Pengeluaran Khusus	Pengeluaran Non Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	76,80	19,11	4,09
C. Industri Pengolahan	19,81	78,88	1,31
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	15,17	75,45	9,38
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	60,75	38,17	1,08
F. Konstruksi	32,15	67,26	0,59
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	89,77	0,00	10,23
H. Pengangkutan dan Pergudangan	86,15	10,20	3,64

Lapangan Usaha	Pengeluaran Umum	Pengeluaran Khusus	Pengeluaran Non Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	19,77	77,72	2,51
J. Informasi dan Komunikasi	8,78	90,97	0,25
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	11,81	85,01	3,18
L. Real Estat	83,18	9,63	7,18
M, N. Jasa Perusahaan	20,61	57,99	3,22
P. Pendidikan	52,34	69,85	0,64
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	39,81	50,42	1,99
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	46,39	54,40	3,24
<b>Maluku</b>	<b>38,72</b>	<b>53,87</b>	<b>2,91</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Sementara itu, sebagian besar total pendapatan usaha/perusahaan UMK bersumber dari pendapatan usaha yakni sebesar 75,36 persen. Total pendapatan usaha/perusahaan UMK menurut lapangan usaha yang dicakup dalam

SE2016-Lanjutan, semuanya bersumber dari pendapatan usaha. Konstruksi (Kategori F) merupakan satu-satunya kategori usaha yang pendapatan lainnya mencapai 49,56 persen.

**Tabel 2.5. Persentase Total Pendapatan Usaha/Perusahaan UMK menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pendapatan selama Setahun di Provinsi Maluku, 2016**

Kategori	Pendapatan Usaha	Pendapatan Lainnya	Pendapatan Non Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	99,28	0,42	0,29
C. Industri Pengolahan	96,61	3,14	0,25
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	93,85	5,39	0,76

Kategori (1)	Pendapatan Usaha (2)	Pendapatan Lainnya (3)	Pendapatan Non Operasional (4)
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	96,39	3,57	0,04
F. Konstruksi	50,39	49,56	0,05
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	93,28	6,04	0,68
H. Pengangkutan dan Pergudangan	93,43	6,41	0,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	81,14	18,68	0,18
J. Informasi dan Komunikasi	92,82	6,56	0,62
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	94,37	4,60	1,03
L. Real Estat	90,73	7,46	1,82
M, N. Jasa Perusahaan	97,26	2,24	0,49
P. Pendidikan	83,65	16,05	0,31
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	70,54	12,11	17,35
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	76,48	15,86	7,67
<b>Total</b>	<b>75,36</b>	<b>24,41</b>	<b>0,23</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

<https://maluku.bps.go.id>



BAB

# 3

KERAJINAN KULIT KERANG KHAS MALUKU

## AKSESIBILITAS PERMODALAN UMK



# Aksesibilitas Permodalan UMK

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Seperti diketahui jumlah UMK yang mendominasi jumlah usaha di Indonesia, tidak terkecuali di Maluku. Dengan kapasitas usaha yang relatif kecil, banyak menggunakan modal sendiri. Dalam RPJMN 2015-2019, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan bagi UMKM merupakan salah satu arah pembangunan untuk meningkatkan daya saing UMK. Dengan demikian, kemudahan aksesibilitas permodalan merupakan aspek penting yang perlu dilihat sebagai usaha untuk mengidentifikasi apakah program dan kebijakan pemerintah telah memberikan hasil yang menggembirakan. Jika belum, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya akses terhadap sumber daya modal perlu diidentifikasi.

## 1. UMK Minim Akses Perbankan

### a. Akses UMK terhadap Bank dan Lembaga Keuangan

Akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan.

**Tabel 3.1. Jumlah Rekening UMK yang Menerima Kredit di Provinsi Maluku Tahun 2012-2016**

Tahun	Jumlah Rekening
(1)	(2)
2012	27.418
2013	30.825
2014	35.188
2015	40.580
2016	46.452

Sumber: OJK Provinsi Maluku

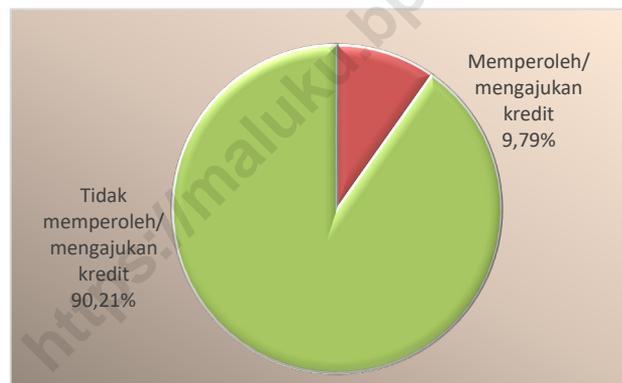
Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa hanya sekitar 9 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan.

Sebanyak 44 persen UMK yang tidak mengajukan kredit melalui lembaga keuangan merasa belum perlu untuk mengajukan kredit.

Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat sebesar 46.452 jumlah rekening UMK yang menerima kredit di tahun 2016. Mulai dari tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan jumlah rekening UMK yang memperoleh kredit.

Hasil SE2106-Lanjutan mencatat 9,79 persen UMK yang memperoleh/ mengajukan kredit ke lembaga keuangan selama tahun 2016. Dengan adanya peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan Bank Umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM seharusnya dapat lebih lagi dimanfaatkan untuk keperluan modal pengembangan usaha.

**Gambar 3.1. Persentase UMK Nonpertanian Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

#### **b. Alasan UMK tidak menjadikan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Sumber Pemberi Modal/Usaha**

Gambar 3.2 menunjukkan sekitar 19,32 persen pengusaha UMK tidak menerima kredit selama tahun 2016 dari lembaga keuangan adalah karena tidak tahu prosedur, dan sekitar 16,83 persen menyatakan karena suku bunga yang tinggi; 9,44 persen karena tidak ada agunan, 7,83 persen karena prosedur yang

sulit; serta 2,12 persen usulan yang ditolak. Selain itu, sebagian besar pengusaha UMK menyatakan karena alasan lainnya, tercatat sekitar 44,46 persen. Alasan lainnya tersebut diantaranya adalah merasa belum membutuhkan pinjaman modal selama tahun 2016.

**Gambar 3.2. Persentase UMK yang Tidak Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

### c. Sektor Perdagangan Yang Paling Banyak Mengakses Modal Perbankan

Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) selain mendominasi jumlah UMK juga menyerap tenaga kerja UMK paling banyak. Demikian halnya dengan akses modal perbankan. Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa Sektor Perdagangan memperoleh modal

paling banyak di Maluku, sekitar 15,80 persen. Selanjutnya Usaha Penyewaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N) dan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis (Kategori M) juga banyak mengakses modal perbankan, masing-masing mencapai 13,90 persen dan 13,37 persen.

**Gambar 3.3. Persentase UMK yang Mempunyai Akses ke Lembaga Keuangan menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

## 2. Peluang UMK mendapatkan Akses Permodalan Terhadap Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank Serta Determinannya

### a. Lokasi Usaha

Pemerintah saat ini memperluas akses permodalan baik di perkotaan dan pedesaan. Dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah memogramkan pembangunan Bank Khusus UMKM dan koperasi untuk mempermudah akses usaha di pedesaan. Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa persentase UMK di daerah pedesaan yang mempunyai akses ke lembaga keuangan lebih tinggi dari yang

tidak mempunyai akses. Demikian juga persentase jumlah UMK di daerah perkotaan yang mempunyai akses ke lembaga keuangan lebih tinggi dari yang tidak mempunyai akses. Persentase jumlah UMK yang mempunyai akses ke lembaga keuangan di daerah perkotaan mencapai 11,65 persen, lebih tinggi dari daerah pedesaan yang tercatat sekitar 8,47 persen.

**Gambar 3.4. Persentase Akses UMK ke Lembaga Keuangan menurut Lokasi Usaha di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

### b. Anggota Koperasi, Anggota Asosiasi, dan Kemitraan Usaha

Dalam RPJMN 2015-2019 peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi menjadi target dalam peningkatan daya saing UMKM melalui penguatan

permodalan. Dalam hal ini target pemerintah adalah peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55,0 persen

dalam lima tahun. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa persentase UMK berkeanggotaan koperasi yang memiliki akses ke lembaga keuangan mencapai 37,59 persen, lebih tinggi dari yang tidak berkeanggotaan koperasi yang tercatat hanya sekitar 9,46 persen. Jika dirinci menurut keanggotaan asosiasi, UMK yang tidak berkeanggotaan asosiasi justru memiliki akses ke lembaga

keuangan lebih tinggi dari yang berkeanggotaan asosiasi, tercatat sekitar 9,79 persen. Sementara UMK yang memiliki kemitraan usaha, ternyata memiliki akses yang lebih tinggi ke lembaga keuangan dibanding yang tidak bermitra dengan usaha besar, tercatat sekitar 16,43 persen.

**Tabel 3.2. Persentase Akses terhadap Lembaga Keuangan menurut Keanggotaan Koperasi, Keanggotaan Asosiasi dan Kemitraan UMK dengan Usaha/Perusahaan Lain di Provinsi Maluku, 2016**

Uraian	Anggota Koperasi		Anggota Asosiasi		Kemitraan Usaha		Jumlah
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
Pernah Menerima kredit	37,59	9,46	8,91	9,79	16,43	9,38	9,79
Tidak Pernah Menerima Kredit	62,41	90,54	91,09	90,21	83,57	90,62	90,21
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

### c. Penerimaan (Pengalaman) Kredit Sebelumnya

Permen Kemenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015, mensyaratkan calon penerima KUR adalah mereka yang bisa saja masih memiliki kredit pembiayaan lainnya namun memiliki kolektabilitas lancar. Pengalaman pinjaman sebelumnya menentukan akses permodalan saat ini. Pengusaha yang sudah sering berhubungan dengan bank

umumnya memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga pembiayaan, terutama mereka yang memiliki *track record* yang baik dalam pembayarannya. Berbeda dengan pengusaha yang memiliki *track record* yang buruk, cenderung tidak mendapatkan

kepercayaan atau pinjaman dari lembaga pembiayaan yang ada.

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa saat awal pendirian tercatat 95,69 persen UMK menggunakan sebesar lebih dari 50 persen modal milik sendiri. Saat pencacahan meningkat menjadi 95,97 persen UMK masih menggunakan sebesar lebih dari 50 persen modal milik sendiri.

Selanjutnya tercatat 44,05 persen UMK saat awal pendirian menggunakan sebesar lebih dari 50 persen modal pinjaman bank. Saat pencacahan, berkurang menjadi hanya 30,63 persen UMK yang menggunakan sebesar lebih dari 50 persen modal pinjaman bank.

Kemudian, sekitar 43,80 persen UMK saat awal pendirian yang menggunakan sebesar lebih dari 50 persen modal pinjaman non-bank. Berkurang saat pencacahan, tercatat 19,44 persen UMK menggunakan sebesar lebih dari 50 persen modal pinjaman non-bank.

Sementara itu, sekitar 71,57 persen UMK yang awal pendirian menggunakan sebesar lebih dari 50 persen modal pinjaman perorangan, keluarga dan lainnya. Saat pencacahan berkurang menjadi hanya 44,60 persen UMK yang menggunakan sebesar lebih dari 50 persen modal pinjaman perorangan, keluarga dan lainnya.

**Tabel 3.3. Jumlah UMK menurut Komposisi Permodalan pada Awal Pendirian dan Saat Pencacahan**

Uraian	Awal Pendirian		Saat Pencacahan	
	≤ 50 Persen	> 50 Persen	≤ 50 Persen	> 50 Persen
Milik Sendiri	4,31	95,69	4,03	95,97
Pinjaman Bank	55,95	44,05	69,37	30,63
Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank (Koperasi, Modal Ventura)	56,20	43,80	80,56	19,44
Pinjaman Perorangan, Keluarga, dan Lainnya	28,43	71,57	55,40	44,60

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

#### d. Skala Usaha

Usaha skala yang lebih besar memiliki peluang yang paling besar untuk mengakses pembiayaan ke perbankan. Usaha skala yang lebih kecil memungkinkan memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan usaha skala mikro karena telah memiliki jumlah asset dan omzet lebih besar yang dapat dijadikan

sebagai *collateral* bagi pihak perbankan (Poernamasari, 2015). Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa persentase UMK berskala usaha kecil yang mempunyai akses ke lembaga keuangan mencapai 15,59 persen, lebih tinggi dari usaha berskala mikro yang tercatat sebesar 9,27 persen.

**Gambar 3.5. Persentase Akses UMK Nonpertanian ke Lembaga Keuangan menurut Skala Usaha di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

#### e. Lama Operasi

Dalam Permen Kemenko Perekonomian No 8 Tahun 2015, calon penerima KUR diantaranya adalah mereka yang usahanya telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Hasil SE2016-Lanjutan dalam Gambar 3.5 menunjukkan bahwa UMK yang pernah menerima kredit selama tahun 2016 paling

tinggi pada UMK dengan lama operasi 0-5 tahun, tercatat sebesar 12,06 persen. Hal ini dikarenakan UMK dengan lama operasi 0-5 tahun masih membutuhkan pinjaman modal dominan dari lembaga keuangan dibanding usaha dengan lama operasi lebih dari 5 tahun.

**Gambar 3.6. Persentase Akses terhadap Lembaga Keuangan Menurut Lama Usaha di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan, data diolah

**f. Status Badan Usaha**

Dalam Permen Kemenko Perekonomian No 8 Tahun 2015, Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan

kredit oleh Penyalur KUR. Profil perusahaan yang legal (memiliki ijin usaha) tentunya akan mendapatkan prioritas.

**Gambar 3.7. Persentase Akses UMK ke Lembaga Keuangan menurut Status Badan Usaha di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan, data diolah

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa persentase UMK berbadan hukum memiliki akses ke lembaga keuangan mencapai 18,55 persen. Sedangkan persentase UMK tidak berbadan hukum memiliki akses ke lembaga keuangan, mencapai 8,32 persen. Sebaliknya persentase UMK berbadan

hukum tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, mencapai 81,45 persen. Sementara persentase UMK tidak berbadan hukum dan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, mencapai 91,68 persen.

### g. Penggunaan Internet

Akses informasi sangat sulit terlepas dari teknologi informasi terutama internet (Nurtiar, 2010). Akses internet memungkinkan pengusaha untuk mengakses sendiri berbagai sumber informasi, termasuk mengenai prosedur pengajuan kredit. Hasil SE2016-Lanjutan

menunjukkan bahwa persentase UMK pengguna internet yang mempunyai akses ke lembaga keuangan mencapai 16,47 persen, lebih tinggi dari yang tidak menggunakan internet, tercatat hanya sekitar 9,46 persen yang pernah menerima kredit.

**Gambar 3.8. Persentase Akses UMK ke Lembaga Keuangan menurut Penggunaan Internet di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah



BAB

# 4

*KERAJINAN KULIT KERANG KHAS MALUKU*

**KINERJA  
USAHA  
UMK**

# Kinerja Usaha UMK

## 1. Kondisi UMK menurut Laba yang Diperoleh

Kinerja sebuah perusahaan atau usaha dapat diukur dari berbagai macam perspektif, secara sederhana dapat dinilai dari nilai labanya. Hal ini didasari pada tujuan didirikannya suatu perusahaan atau usaha adalah untuk mencapai keuntungan atau laba yang maksimal dengan menggunakan modal yang minimal (Harjito dan Martono, 2011). Variabel lainnya adalah dengan menggunakan Nilai Tambah Ekonomis (*Economic Value Added/ EVA*).

Menurut Paul A. Dierks (2000), EVA merupakan ukuran kinerja keuangan yang menggabungkan konsep pendapatan residual dengan prinsip keuangan perusahaan modern. Secara matematis EVA merupakan laba operasi bersih (setelah dikurangi pajak) dikurangi dengan modal yang diinvestasikan dikalikan biaya rata-rata tertimbang modal. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai yang tinggi bagi pemegang saham. Selain dari margin dan EVA kinerja usaha dapat diukur dari menggunakan rasio-rasio keuangan seperti R/C (*Revenue Cost*) rasio yaitu rasio pendapatan terhadap pengeluaran, atau dengan kinerja yang lebih kompleks seperti efisiensi.

**Gambar 4.1. Persentase UMK Menurut Kondisi Laba 2016 Dibanding 2015 di Provinsi Maluku**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Hasil SE2016-Lanjutan mencatat perolehan laba (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Lebih dari seperlima pengusaha UMK di Maluku menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Lebih dari seperlima pengusaha UMK di Maluku menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Usaha-usaha yang mengalami penurunan laba paling banyak adalah Sektor

Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; serta Aktivitas Jasa Lainnya. Jumlah pengusaha Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; serta Aktivitas Jasa Lainnya yang menyatakan bahwa prospek mereka terus menurun, masing-masing ada sebanyak 37,00 persen dan 31,96 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibanding sektor lainnya.

**Gambar 4.2. Persentase UMK yang mengalami Kenaikan Laba Usaha di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

Sebaliknya, usaha yang paling banyak mengalami peningkatan laba adalah Sektor Industri Pengolahan. Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa usaha ini memiliki cara pengelolaan yang relatif paling baik dibandingkan sektor lainnya. Hal ini

tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. Pengusaha pada sektor ini juga sebagian besar menyatakan bisnis mereka memiliki prospek yang baik di tahun 2018.

## 2. Kinerja UMK Menurut Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan

Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (*cost to income*) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. UMK di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah yang paling *profitable* di Maluku dengan rasio 0,50. Sektor UMK

di kabupaten ini mampu meraup keuntungan hingga dua kali lipat biaya produksi yang dikeluarkan. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan dengan rasio 0,60.

**Tabel 4.1. Sebaran UMK menurut Kinerja Keuangan Tertinggi dan Terendah di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2016**

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan
(1)	(2)	(3)
Maluku Tenggara Barat	12.634	0,60
Maluku Tenggara	5.053	0,60
Maluku Tengah	37.665	0,55
Buru	11.667	0,52
Kepulauan Aru	5.018	0,58
Seram Bagian Barat	17.305	0,53
Seram Bagian Timur	6.483	0,56
Maluku Barat Daya	6.438	0,50
Buru Selatan	5.460	0,60
Ambon	35.142	0,51
Tual	4.833	0,56
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>0,53</b>

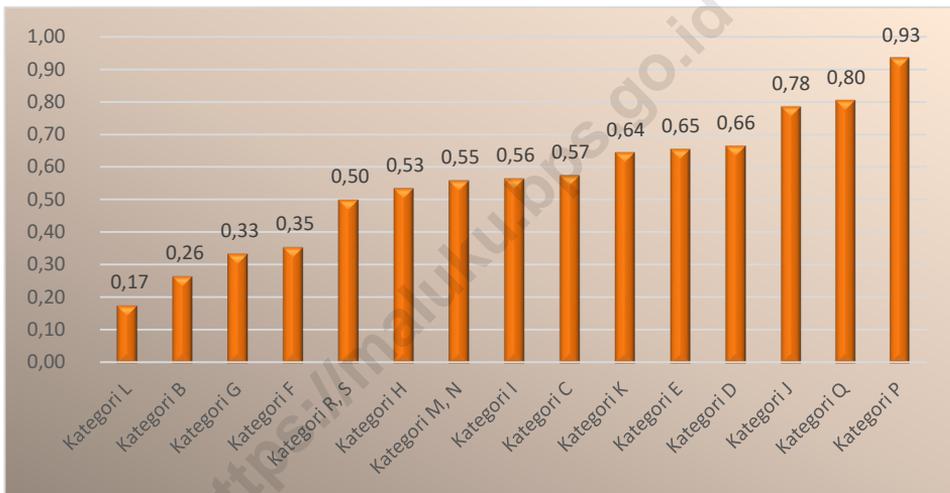
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

- Catatan :
1. Rasio pengeluaran terhadap pendapatan menunjukkan tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin menguntungkan atau semakin baik kinerja keuangannya.
  2. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, dan Buru Selatan merupakan kabupaten dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi se-Maluku.
  3. Maluku Barat Daya merupakan kabupaten dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan terendah se-Maluku.

Jika dicermati lebih jauh, Kategori L (Real Estat) dan B (Pertambangan dan Penggalian) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,17 dan 0,26. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu

mendulang pendapatan hingga sekitar empat kali lipat biaya produksi yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi ada pada Kategori P (Pendidikan) dengan rasio mencapai 0,93.

**Gambar 4.3. Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Namun demikian, Kategori L, dan B bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Kategori P (Pendidikan) memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 29 juta rupiah per pekerja per tahun. Selanjutnya, Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial), Kategori F (Konstruksi), dan Kategori M (Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis)

memberikan balas jasa lebih dari 20 juta rupiah per pekerja per tahun. Sedangkan upah pekerja di Provinsi Maluku secara rata-rata berada pada kisaran 20,67 juta rupiah per pekerja per tahun.

Provinsi Maluku memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 sebesar Rp. 1.775.000 per bulan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, 2016). Jika dirinci menurut kategori maka Tabel

4.2 menunjukkan bahwa dari 19 kategori nonpertanian, hanya 5 kategori yang memiliki rata-rata balas jasa dan upah pekerja dibayar per bulan di atas UMP sudah diterapkan pada usaha/perusahaan dengan Kategori F (Konstruksi), Kategori K

(Aktivitas Keuangan dan Asuransi), Kategori M (Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis), Kategori P (Pendidikan) dan Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial).

**Tabel 4.2. Rata - Rata Balas Jasa dan Upah per Pekerja Dibayar UMK Nonpertanian menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2016**

Lapangan Usaha	Rata-Rata Balas Jasa dan Upah per Pekerja per tahun	Rata-Rata Balas Jasa dan Upah per Pekerja per bulan
(1)	(2)	(3)
B. Pertambangan dan Penggalian	19.625.741,00	1.635.478,42
C. Industri Pengolahan	8.590.453,00	715.871,08
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	14.786.000,00	1.232.166,67
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	13.210.097,00	1.100.841,42
F. Konstruksi	24.602.912,00	2.050.242,67
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	13.549.441,00	1.129.120,08
H. Pengangkutan dan Pergudangan	12.831.026,00	1.069.252,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	13.872.115,00	1.156.009,58
J. Informasi dan Komunikasi	13.247.059,00	1.103.921,58
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	25.095.464,00	2.091.288,67
L. Real Estat	12.692.571,00	1.057.714,25
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	23.576.223,00	1.964.685,25
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	10.334.771,00	861.230,92
P. Pendidikan	29.571.037,00	2.464.253,08
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	28.257.460,00	2.354.788,33
R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	14.512.391,00	1.209.365,92
S. Aktivitas Jasa Lainnya	14.132.969,00	1.177.747,42
<b>Rata-rata</b>	<b>20.672.514,00</b>	<b>1.722.709,50</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

### 3. Hubungan Kemitraan dengan Kondisi Laba

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan UMK yang menjalankan kemitraan menyatakan labanya meningkat 36,27 persen dibandingkan tahun 2015. Sedangkan UMK yang tidak menjalankan kemitraan menyatakan labanya meningkat hanya

sekitar 30 persen dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, persentase UMK yang menjalin kemitraan ternyata lebih sedikit mengalami penurunan laba dibandingkan dengan yang tidak menjalin kemitraan.

**Gambar 4.4. Persentase Kondisi Laba UMK Nonpertanian di Provinsi Maluku Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 menurut Kemitraan**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

### 4. Hubungan Penggunaan Komputer dengan Kondisi Laba

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan UMK yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan komputer, sebagian besar menyatakan kondisi laba tahun 2016 tetap dibanding tahun 2015. Data dalam Tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa UMK yang menggunakan komputer mencapai 34,59 persen yang menyatakan labanya

meningkat, lebih tinggi dari UMK yang tidak menggunakan komputer, tercatat sebesar 30,28 persen. Sementara itu, persentase UMK yang mengalami penurunan laba pada tahun sebelumnya lebih banyak pada usaha yang tidak menggunakan komputer.

**Tabel 4.3. Persentase Kondisi Laba UMK Nonpertanian di Provinsi Maluku Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 menurut Penggunaan Komputer**

Uraian	Laba 2016 dibanding 2015				Jumlah
	Meningkat	Tetap	Menurun	Tidak Dapat dibandingkan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menggunakan Komputer	34,59	39,01	16,98	9,42	<b>100,00</b>
Tidak Menggunakan Komputer	30,28	37,56	21,86	10,30	<b>100,00</b>
<b>Total</b>	<b>30,49</b>	<b>37,62</b>	<b>21,62</b>	<b>10,26</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

### 5. Hubungan Penggunaan Internet dengan Kondisi Laba

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa dari UMK yang menggunakan internet, sebagian besar diantaranya menyatakan labanya meningkat yaitu sekitar 40 persen, lebih tinggi dari UMK yang tidak menggunakan internet,

tercatat sekitar 30 persen. Sementara itu, persentase UMK yang mengalami penurunan laba lebih banyak terjadi pada usaha yang tidak menggunakan internet dibandingkan dengan yang menggunakan internet.

**Tabel 4.4. Persentase Kondisi Laba UMK Nonpertanian Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 menurut Penggunaan Internet di Provinsi Maluku**

Uraian	Laba 2016 dibanding 2015				Jumlah
	Meningkat	Tetap	Menurun	Tidak Dapat dibandingkan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menggunakan Internet	40,48	31,20	19,94	8,38	<b>100,00</b>
Tidak Menggunakan Internet	30,00	37,94	21,71	10,36	<b>100,00</b>
<b>Total</b>	<b>30,49</b>	<b>37,62</b>	<b>21,62</b>	<b>10,26</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah



BAB

# 5

*KERAJINAN KULIT KERANG KHAS MALUKU*

**PROSPEK  
USAHA  
UMK**

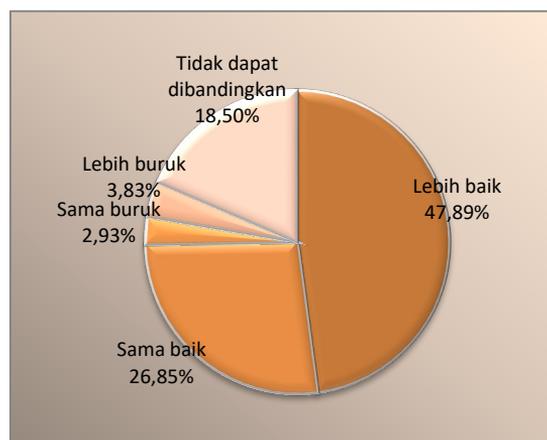
# Prospek Usaha UMK

RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset.

## 1. Prospek UMK Di Masa Mendatang

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di tahun 2018 mencapai 47,89 persen. Sementara itu, pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan sama baik di tahun 2018 mencapai 26,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi UMK pada tahun 2017 berada pada level baik dan optimis akan lebih baik di tahun berikutnya.

**Gambar 5.1. Persentase UMK Nonpertanian menurut Prospek Usaha di Provinsi Maluku, 2017**

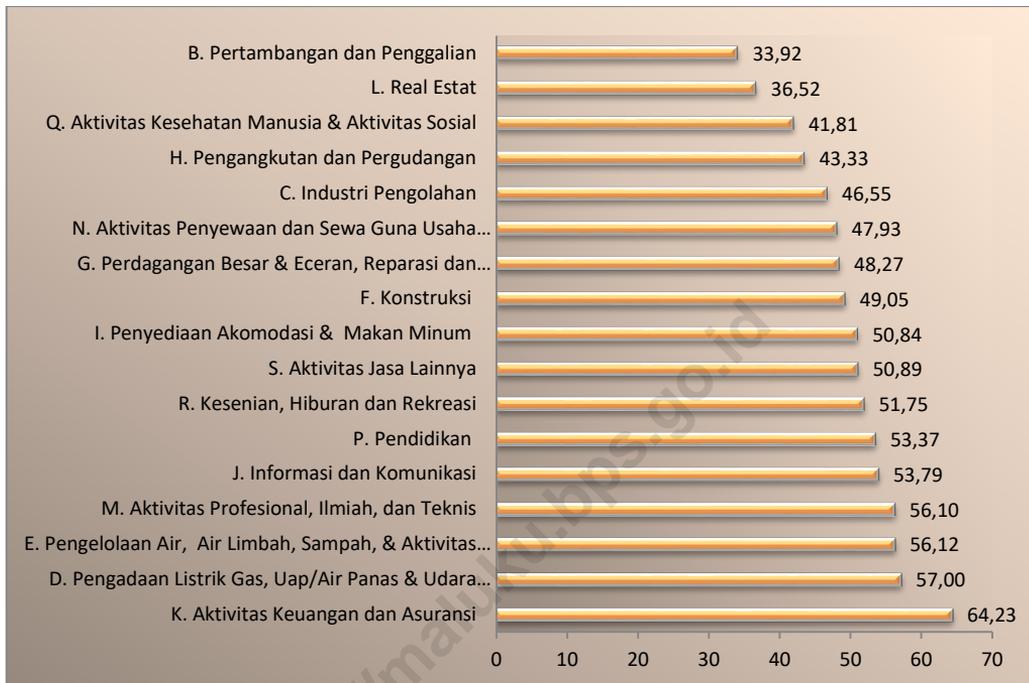


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan, UMK yang memperkirakan bahwa usaha/perusahaan akan lebih baik di tahun 2018 mencapai 47,89 persen.

Sekitar 76 persen UMK di Maluku memiliki kendala dalam menjalankan usaha.

**Gambar 5.2. Proporsi UMK Yang Memiliki Prospek Lebih Baik Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017**

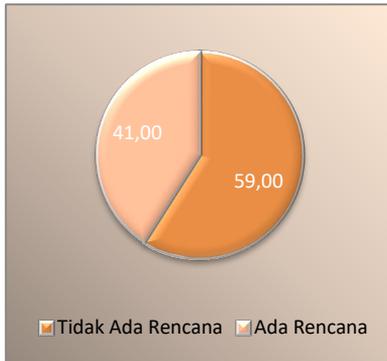


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Sektor Pertambangan dan Penggalian sejak tahun 2015 memiliki pertumbuhan PDRB yang selalu lebih rendah dari angka rata-rata. Pada tahun 2017 pertumbuhannya tidak lebih dari satu persen (Lampiran 15). Pengusaha UMK di Sektor Pertambangan dan Penggalian yang menyatakan usaha ini akan memiliki prospek yang lebih buruk di tahun 2018 ada sebanyak hampir 22 persen pengusaha (Lampiran 17).

Tercatat pengusaha UMK di Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi menyatakan akan memiliki prospek yang lebih baik di tahun 2018 ada sebanyak sekitar 64 persen pengusaha. Selanjutnya Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, terdapat 57 persen pengusaha UMK yang menyatakan akan lebih baik di tahun 2018.

**Gambar 5.3a. Persentase UMK Menurut Ada Tidaknya Rencana Pengembangan Bisnis di Provinsi Maluku, 2017**



Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

**Gambar 5.3b. Proporsi UMK menurut Jenis Rencana Pengembangan Bisnis di Provinsi Maluku, 2017**



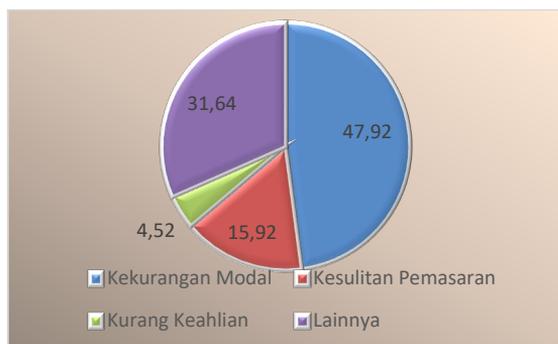
Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

Di sisi lain, sekitar 59 persen pengusaha UMK menyatakan tidak ada rencana untuk melakukan pengembangan usaha dengan berbagai alasan. Alasan utama adalah karena kekurangan modal. Alasan berikutnya antara lain belum merasa perlu untuk mengembangkan usaha, tidak ada tenaga kerja dan sudah memiliki pelanggan tetap yang sudah terbiasa dengan jenis

barang/jasa yang ditawarkan, belum siap/mampu, dan adanya pesaing.

Gambar 5.3.a. juga memberikan informasi bahwa sebanyak 41 persen pengusaha UMK sudah mempunyai rencana untuk mengembangkan usahanya. Prioritas utamanya adalah untuk memperluas tempat usaha dilanjutkan dengan pengembangan produk-produknya.

**Gambar 5.4. Proporsi UMK menurut Alasan Tidak Berencana Melakukan Pengembangan Perusahaan Bisnis di Provinsi Maluku, 2017**



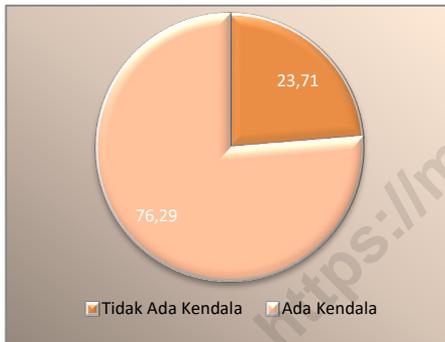
Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

## 2. Permodalan dan Adanya Pesaing Menjadi Kendala Utama UMK dalam Mengembangkan Bisnis

Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Secara umum, sekitar 76,29 persen UMK di Maluku memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Hasil SE2016 Lanjutan

menunjukkan sekitar 58,38 persen pengusaha UMK menyatakan kendala utama mereka adalah terkait permodalan dan sekitar 45,13 persen karena adanya persaingan.

**Gambar 5.5a. Persentase UMK Menurut Ada Tidaknya Kendala yang Dihadapi di Provinsi Maluku, 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Gambar 5.5b. Persentase UMK di Provinsi Maluku yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen), 2016**



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Selain usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan kendaraan, usaha/perusahaan di Sektor Real Estate merasakan permasalahan permodalan sebagai kendala utama dalam berusaha. Dalam SE2016-Lanjutan pelaku UMK yang masuk dalam sektor ini diantaranya sewa/kontrak tanah dan bangunan. Jika dilihat dari kondisi saat ini,

jenis usaha tersebut membutuhkan banyak modal. Pesaing dalam hal ini dapat berasal dari jenis aktivitas ekonomi yang sama.

Usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga memerlukan modal yang tidak sedikit. Sektor akomodasi dan makan minum sangat erat kaitannya dengan tingkat konsumsi masyarakat. Bila dilihat tingkat pertumbuhan konsumsi

masyarakat Maluku tahun 2017, angkanya relatif lebih rendah bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat pertumbuhannya di atas 5 persen (Lampiran 22).

Faktor lain yang menjadi kendala UMK di Provinsi Maluku adalah banyaknya

pesaing. Sektor yang merasakan tingginya persaingan dari jenis aktivitas ekonomi yang sama sebagaimana dalam Tabel 5.1. adalah Sektor Pengangkutan dan Pergudangan, tercatat sekitar 69,65 persen.

**Tabel 5.1. Proporsi UMK yang Menyatakan Adanya Pesaing dan Adanya Kendala Permodalan/Likuiditas Menurut Kategori di Provinsi Maluku, 2017**

Lapangan Usaha	Permodalan/Likuiditas	Adanya Pesaing
(1)	(2)	(3)
B. Pertambangan dan Penggalian	35,64	27,45
C. Industri Pengolahan	51,26	25,57
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	45,59	45,59
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	29,28	62,16
F. Konstruksi	45,81	49,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	67,55	52,30
H. Pengangkutan dan Pergudangan	41,81	69,65
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	63,51	47,91
J. Informasi dan Komunikasi	61,69	53,50
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	63,44	29,39
L. Real Estat	65,42	30,00
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	45,65	57,97
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	51,77	57,14
P. Pendidikan	31,60	11,16
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	19,55	17,75
R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	51,83	45,07
S. Aktivitas Jasa Lainnya	56,07	50,19

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UMK Lebih Prospektif

Hambatan eksternal maupun internal akan menimbulkan kendala-kendala lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan UMKM, antara lain: pangsa pasar yang lemah, modal yang terbatas, keterbatasan jejaring usaha (Sudoko, 1995). Oleh sebab itu, kendala usaha yang dihadapi UMK perlu diidentifikasi dan diselesaikan agar mampu bersaing.

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa faktor internal seluruhnya berpengaruh positif, diantaranya penjualan online, penerimaan kredit, dan

akses internet. Pertumbuhan penjualan online sebesar 1,340 persen akan meningkatkan peluang UMK tersebut untuk memiliki prospek yang lebih baik/sama baiknya di tahun 2018. Kemudian, pertumbuhan penerimaan kredit sebesar 1,241 persen juga akan meningkatkan peluang UMK tersebut untuk memiliki prospek yang lebih baik/sama baiknya di tahun 2018. Serta pertumbuhan akses internet yang mencapai 1,615 persen juga meningkatkan persepsi tendensi bisnis yang membaik.

**Tabel 5.2. Tabel Odds Ratio Hasil Estimasi Model Prospek Usaha UMK**

	Variabel	Odds Ratio
<b>Faktor Internal</b>	Penjualan Online	1,340
	Penerimaan Kredit	1,241
	Akses internet	1,615
<b>Faktor Eksternal (kendala yang dirasakan)</b>	Ada kendala peraturan dan birokrasi pemerintah	0,900
	Ada kendala penyediaan barang baku/barang dagangan	0,854
	Ada kendala perolehan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi	0,955
	Ada kendala infrastruktur	1,191
	Ada kendala permodalan	1,021
	Ada kendala pemasaran	0,621

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

Faktor eksternal (kendala yang dirasakan) sebagian besar berpengaruh negatif, kecuali kendala infrastruktur dan kendala permodalan. Kendala peraturan dan birokrasi pemerintah, penyediaan barang/baku dagangan, perolehan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pemasaran, akan berpengaruh secara langsung terhadap produktifitas usaha. Sedangkan kendala infrastruktur dan kendala permodalan tidak berpengaruh secara langsung yang ditunjukkan dengan penerimaan kredit tidak berpengaruh terhadap peningkatan laba usaha (Bab III).

Dalam pengembangan usaha, inovasi dan penggunaan teknologi sangatlah penting.

Saat ini teknologi informasi berkembang dengan pesat termasuk dalam dunia usaha. Manfaat bagi dunia usaha adalah untuk mendukung proses bisnis guna mencapai keunggulan kompetitif. Salah satu penggunaan teknologi adalah penggunaan internet. UMK yang memanfaatkan internet dalam usahanya memberikan peluang UMK untuk memiliki prospek usaha yang positif 1,615 kali. Dengan akses penguasaan teknologi yang mumpuni dan mengikuti perkembangan jaman, prospek UMK akan menjadi lebih baik di masa mendatang.



BAB

# 6

*KERAJINAN KULIT KERANG KHAS MALUKU*

**KESIMPULAN  
DAN  
REKOMENDASI  
KEBIJAKAN**

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## 1. Kesimpulan

Dunia usaha Maluku pada saat ini masih didominasi oleh usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil (UMK). Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan jumlah UMK mencapai 147,7 ribu usaha, 99,94 persen dari total usaha non pertanian di Maluku. UMK mampu menyerap tenaga kerja Maluku lebih dari 321 ribu orang atau sekitar 96,99 persen dari total tenaga kerja nonpertanian di Maluku. Hal ini mengindikasikan bahwa UMK masih diandalkan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

UMK memiliki ciri khas usaha yang fleksibel, diantaranya memberikan keuntungan ditengah badai krisis yang telah menerpa Indonesia pada beberapa tahun yang lalu, tidak terkecuali di Maluku. UMK sangat elastis, mudah merubah produk usaha, berinovasi, berimprovisasi menyesuaikan kondisi sesuai situasi usaha, peluang dan lainnya. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana dan memerlukan modal yang relatif kecil. Tempat usaha pun tidak harus selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah, dan dapat dilakukan di dalam rumah.

Namun di sisi lain, UMK mempunyai banyak keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen, khususnya yang berorientasi ekspor.

Persentase UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendo-

minasi, mencapai 86 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Hasil SE2016 Lanjutan mencatat mencapai hampir 5 persen UMK yang menggunakan komputer atau memanfaatkan internet, dan sekitar 6 persen yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Sekitar 31 persen pengelola berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Pengelola dengan pendidikan SMA dan SMK juga cukup besar mencapai 37 persen. Di samping itu, UMK yang pernah mengikutsertakan pekerjanya dalam pelatihan hanya 3,99 persen.

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Pada tahun 2016, usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan tergolong relatif sedikit, hanya sekitar 9,79 persen. Alasan UMK tidak memperoleh/mengajukan

kredit melalui lembaga keuangan utamanya karena bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak.

Karakteristik pengusaha dan usaha menjadi faktor pembeda antara usaha yang berhasil memperoleh kredit dengan usaha yang tidak memperoleh kredit. Faktor tersebut adalah lokasi (perkotaan/pedesaan), skala usaha, lama beroperasi, dan sistem usaha. Usaha dengan skala kecil yang pengelolanya perempuan dan berpendidikan lebih dari SD, lokasi di pedesaan, sudah lama beroperasi, dan sistem usaha konvensional, memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh kredit.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMK, selayaknya perlu ada peningkatan kinerja usaha. Hal ini dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah dengan melihat laba usaha. Berdasarkan hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba UMK menunjukkan capaian yang positif. Sepertiga pengusaha UMK di Maluku menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Faktor lain yang menjadi penentu laba usaha yang diperoleh adalah kemitraan usaha, penggunaan komputer dan penggunaan internet. UMK yang menjalankan kemitraan, menggunakan komputer serta internet cenderung memiliki laba yang lebih besar.

Untuk meningkatkan potensi UMK di masa mendatang perlu diidentifikasi prospek yang dirasakan oleh pengusaha dan faktor pendorongnya. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. UMK

## 2. Rekomendasi Kebijakan

Pelaku UMK yang mayoritas berpendidikan rendah dan memiliki jiwa kewirausahaan yang rendah perlu diberikan pelatihan, yaitu terkait dengan motivasi usaha (jiwa kewirausahaan), kemampuan manajerial (pemasaran, produksi, SDM, keuangan), dan kemampuan dalam aspek teknis (fashion, perbengkelan, budi daya pertanian, dsb). Dengan adanya dunia usaha berbasis online yang makin berkembang saat ini,

yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang mencapai hampir 48 persen.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi pengusaha bahwa usahanya berkembang dengan baik (prospektif). Faktor tersebut diantaranya faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diwakili oleh faktor keluhan/kendala usaha, diantaranya berkaitan dengan aturan/birokrasi pemerintah, masalah bahan baku, dan BBM. Sedangkan faktor internal tercermin dari penjualan online, penerimaan kredit, dan penggunaan internet untuk pemasaran.

pelaku UMK di Maluku yang sebagian besar belum menggunakan internet perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi internet sehingga usaha yang dilakukan bukan hanya berbasis konvensional namun mampu melihat peluang agar bisa bertransformasi ke struktur ekonomi baru berbasis *e-commerce*. Hal ini tentunya akan meningkatkan daya saing dari pelaku UMK di Maluku.

Di samping itu, pelaku UMK perlu diperbaiki *mindsetnya*. *Mindset* UMK harus diubah untuk selalu mengembangkan usaha, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Dengan demikian, usahanya bisa lebih berkembang dan naik kelas.

Untuk meningkatkan kapabilitas pelaku UMK, jejaring usaha juga sangat penting karena umumnya masalah UMK disebabkan oleh minimnya pendampingan dan penyuluhan. Pendampingan sangat bermanfaat bagi UMK untuk meningkatkan pengetahuan

mengenai pengembangan usaha. Salah satu bentuk pendampingan adalah membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan modal dari bank. Selain itu, UMK juga perlu diberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan khusus dari aspek tingkat suku bunga agar mampu mengembangkan/memperluas usaha. UMK yang telah diberikan pinjaman perlu dimonitoring dan dievaluasi agar modal yang diterima dapat digunakan secara baik dan tepat sasaran.

## A. Model Aksesibilitas Permodalan UMK: Analisis Crosstabs

- Lokasi Usaha

Modal Usaha : 0 = Tidak pernah menerima kredit  
1 = Pernah menerima kredit

Lokasi Usaha : 0 = Urban  
1 = Rural

### Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Modal_Usaha * Lokasi_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

Modal\_Usaha \* Lokasi\_Usaha Crosstabulation

Count

	Lokasi_Usaha	Total	
		.00	1.00
Modal_Usaha .00	79358	53887	133245
1.00	7347	7106	14453
Total	86705	60993	147698

- Anggota Koperasi, Anggota Asosiasi, dan Kemitraan Usaha

Modal Usaha : 0 = Tidak pernah menerima kredit  
1 = Pernah menerima kredit

Anggota Koperasi : 0 = Tidak  
1 = Ya

Anggota Asosiasi : 0 = Tidak  
1 = Ya

Kemitraan Usaha : 0 = Tidak  
1 = Ya

## → Crosstabs

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Modal_Usaha * Anggota_Koperasi	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%
Modal_Usaha * Anggota_Asosiasi	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%
Modal_Usaha * Kemitraan_Usaha	147698 <sup>a</sup>	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell counts have been rounded.

**Modal\_Usaha \* Anggota\_Koperasi Crosstabulation**

Count

		Anggota_Koperasi		Total
		.00	1.00	
Modal_Usaha	.00	132176	1069	133245
	1.00	13809	644	14453
Total		145985	1713	147698

**Modal\_Usaha \* Anggota\_Asosiasi Crosstabulation**

Count

		Anggota_Asosiasi		Total
		.00	1.00	
Modal_Usaha	.00	132356	889	133245
	1.00	14366	87	14453
Total		146722	976	147698

**Modal\_Usaha \* Kemitraan\_Usaha Crosstabulation**

Count

		Kemitraan_Usaha		Total
		.00	1.00	
Modal_Usaha	.00	126150	7095	133245
	1.00	13058	1395	14453
Total		139208	8490	147698

- **Skala Usaha**

Modal Usaha : 0 = Tidak pernah menerima kredit; 1 = Pernah menerima kredit

Skala Usaha : 0 = Mikro; 1 = Kecil

## Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Modal_Usaha * Skala_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

Modal\_Usaha \* Skala\_Usaha Crosstabulation

Count

		Skala_Usaha		Total
		.00	1.00	
Modal_Usaha	.00	123014	10231	133245
	1.00	12563	1890	14453
Total		135577	12121	147698

- **Lama Operasi**

Modal Usaha : 0 = Tidak Memiliki Akses Modal dari Bank dan Non Bank (Tidak pernah menerima kredit);

1 = Memiliki Akses Modal dari Bank dan Non Bank (Pernah menerima kredit)

Skala Usaha: 0 = Mikro; 1 = Kecil

► **Crosstabs**

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Akses Modal * Lama Usaha UMK	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

Akses Modal \* Lama Usaha UMK Crosstabulation

Count

		Lar						
		.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
Akses Modal	Tidak Memilik Akses Modal dari Bank dan Non Bank	4556	14944	12175	9530	9377	5680	10555
	Memiliki Akses Modal Bank dan Non Bank	721	1925	1500	1130	1527	912	1017
Total		5277	16869	13675	10660	10904	6592	11572

Lama Usaha UMK										
	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00
5	4364	4456	5627	3878	4767	3187	3380	3964	2701	5737
7	528	579	625	495	462	296	437	369	245	390
2	4892	5035	6252	4373	5229	3483	3817	4333	2946	6127

17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00
2150	1902	1840	1183	1662	805	672	1258	593
136	179	117	87	121	82	55	93	43
2286	2081	1957	1270	1783	887	727	1351	636

26.00	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	33.00	34.00
2700	792	656	874	473	660	414	338	585
74	37	62	48	12	19	33	16	42
2774	829	718	922	485	679	447	354	627

35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	41.00	42.00	43.00
515	1104	375	288	215	184	330	108	124
0	16	0	0	0	0	0	12	0
515	1120	375	288	215	184	330	120	124

44.00	45.00	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00	51.00	52.00
139	68	275	16	83	62	7	91	7
0	0	11	0	0	0	0	0	0
139	68	286	16	83	62	7	91	7

53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00
54	97	17	108	55	25	83	1	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	97	17	108	55	25	83	1	12

62.00	63.00	64.00	65.00	66.00	69.00	76.00	81.00	82.00
36	32	38	19	72	7	12	2	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	32	38	19	72	7	12	2	7

83.00	90.00	91.00	92.00	96.00	102.00	103.00	104.00	106.00
13	13	7	6	16	10	5	21	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	7	6	16	10	5	21	15

108.00	116.00	199.00	Total
7	12	17	133245
0	0	0	14453
7	12	17	147698

- **Status Badan Usaha**

Modal Usaha : 0 = Tidak pernah menerima kredit; 1 = Pernah menerima kredit

Skala Usaha : 0 = Mikro; 1 = Kecil

➔ **Crosstabs**

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Akses Modal * Status_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

**Akses Modal \* Status\_Usaha Crosstabulation**

Count

		Status_Usaha		Total
		.00	1.00	
Akses Modal	Tidak Memiliki Akses Modal dari Bank dan Non Bank	116004	17241	133245
	Memiliki Akses Modal Bank dan Non Bank	10527	3926	14453
Total		126531	21167	147698

- **Penggunaan Internet**

Modal Usaha : 0 = Tidak pernah menerima kredit  
1 = Pernah menerima kredit

Penggunaan Internet : 0 = Tidak Menggunakan Internet  
1 = Menggunakan Internet

➔ **Crosstabs**

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Penggunaan_Internet* r301a	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

**Penggunaan\_Internet \* r301a Crosstabulation**

Count		r301a		Total
		1	2	
Penggunaan_Internet	.00	13309	127443	140752
	1.00	1144	5802	6946
Total		14453	133245	147698

## B. Model Kinerja Usaha UMK: Analisis *Crosstabs*

- **Kemitraan**

Kondisi Laba : 1 = Meningkatkan  
2 = Tetap  
3 = Menurun  
4 = Tidak Dapat Dibandingkan

Kemitraan : 0 = Tidak Menjalin Kemitraan  
1 = Menjalin Kemitraan

## Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
r308 * Kemitraan_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

r308 \* Kemitraan\_Usaha Crosstabulation

Count

		Kemitraan_Usaha		Total
		.00	1.00	
r308	1	41953	3079	45032
	2	52498	3073	55571
	3	30412	1526	31938
	4	14345	812	15157
Total		139208	8490	147698

- **Penggunaan Komputer**

Kondisi Laba : 1 = Meningkatkan

2 = Tetap

3 = Menurun

4 = Tidak Dapat Dibandingkan

Penggunaan Komputer : 0 = Tidak Menggunakan Komputer

1 = Menggunakan Komputer

## ➔ Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
r308 * Penggunaan Komputer Dalam Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

**r308 \* Penggunaan Komputer Dalam Usaha  
Crosstabulation**

Count

		Penggunaan Komputer Dalam Usaha		Total
		Menggunakan komputer	Tidak menggunakan komputer	
r308	1	2432	42600	45032
	2	2743	52828	55571
	3	1194	30744	31938
	4	662	14495	15157
Total		7031	140667	147698

- Penggunaan Internet**

Kondisi Laba : 1 = Meningkat  
2 = Tetap  
3 = Menurun  
4 = Tidak Dapat Dibandingkan

Penggunaan Internet : 0 = Tidak Menggunakan Internet  
1 = Menggunakan Internet

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
r308 * Penggunaan Internet Dalam Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

### r308 \* Penggunaan Internet Dalam Usaha Crosstabulation

Count

		Penggunaan Internet Dalam Usaha		Total
		Menggunakan internet	Tidak menggunakan internet	
r308	1	2812	42220	45032
	2	2167	53404	55571
	3	1385	30553	31938
	4	582	14575	15157
Total		6946	140752	147698

### C. Model Prospek Usaha UMK: Analisis *Odd Ratio*

- Faktor Penjualan Online

#### Crosstabs

##### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Penjualan_Online * Prospek_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

##### Penjualan\_Online \* Prospek\_Usaha Crosstabulation

Count

		Prospek_Usaha		Total
		.00	1.00	
Penjualan_Online	.00	36963	109036	145999
	1.00	343	1356	1699
Total		37306	110392	147698

##### Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

##### Tests of Conditional Independence

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	23.402	1	.000
Mantel-Haenszel	23.131	1	.000

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

**Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate**

Estimate			1.340
ln(Estimate)			.293
Standardized Error of ln(Estimate)			.061
Asymptotic Significance (2-sided)			.000
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	1.190
		Upper Bound	1.510
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	.174
		Upper Bound	.412

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

- Faktor Penerimaan Kredit**

**Penerimaan\_Kredit ^ Prospek\_Usaha Crosstabulation**

Count

		Prospek_Usaha		Total
		.00	1.00	
Penerimaan_Kredit	.00	34164	99081	133245
	1.00	3142	11311	14453
Total		37306	110392	147698

**Tests of Homogeneity of the Odds Ratio**

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

**Tests of Conditional Independence**

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	105.080	1	.000
Mantel-Haenszel	104.873	1	.000

- Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

**Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate**

Estimate			1.241
ln(Estimate)			.216
Standardized Error of ln(Estimate)			.021
Asymptotic Significance (2-sided)			.000
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	1.191
		Upper Bound	1.294
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	.175
		Upper Bound	.258

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

- **Akses Internet**

**Crosstabs****Penggunaan\_Internet \* Prospek\_Usaha Crosstabulation**

Count

		Prospek_Usaha		Total
		.00	1.00	
Penggunaan_Internet	.00	36084	104668	140752
	1.00	1222	5724	6946
Total		37306	110392	147698

**Tests of Homogeneity of the Odds Ratio**

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

### Tests of Conditional Independence

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	226.862	1	.000
Mantel-Haenszel	226.435	1	.000

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

### Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate		1.615	
ln(Estimate)		.479	
Standardized Error of ln(Estimate)		.032	
Asymptotic Significance (2-sided)		.000	
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	1.516
		Upper Bound	1.720
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	.416
		Upper Bound	.542

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

- **Faktor Kendala Peraturan dan Birokrasi Pemerintah**

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Peraturan&Birokrasi * Prospek_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

**Peraturan&Birokrasi \* Prospek\_Usaha Crosstabulation**

Count

		Prospek_Usaha		Total
		.00	1.00	
Peraturan&Birokrasi	.00	36467	108153	144620
	1.00	839	2239	3078
Total		37306	110392	147698

**Tests of Homogeneity of the Odds Ratio**

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

**Tests of Conditional Independence**

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	6.658	1	.010
Mantel-Haenszel	6.550	1	.010

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

**Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate**

Estimate			.900
ln(Estimate)			-.106
Standardized Error of ln(Estimate)			.041
Asymptotic Significance (2-sided)			.010
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.830
		Upper Bound	.975
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	-.186
		Upper Bound	-.025

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

- **Faktor Kendala Penyediaan Barang Baku/Barang Dagangan**

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Bahan_Baku * Prospek_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

### Bahan\_Baku \* Prospek\_Usaha Crosstabulation

Count

		Prospek_Usaha		Total
		.00	1.00	
Bahan_Baku	.00	30847	93644	124491
	1.00	6459	16748	23207
Total		37306	110392	147698

### Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

### Tests of Conditional Independence

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	96.615	1	.000
Mantel-Haenszel	96.453	1	.000

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

#### Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate				.854
In(Estimate)				-.158
Standardized Error of In(Estimate)				.016
Asymptotic Significance (2-sided)				.000
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound		.828
		Upper Bound		.881
	In(Common Odds Ratio)	Lower Bound		-.189
		Upper Bound		-.126

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

- **Faktor Kendala Perolehan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Energi**

## Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
BBM&Energi * Prospek_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

#### BBM&Energi \* Prospek\_Usaha Crosstabulation

Count

		Prospek_Usaha		Total
		.00	1.00	
BBM&Energi	.00	35705	105860	141565
	1.00	1601	4532	6133
Total		37306	110392	147698

**Tests of Homogeneity of the Odds Ratio**

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

**Tests of Conditional Independence**

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	2.428	1	.119
Mantel-Haenszel	2.381	1	.123

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

**Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate**

Estimate			.955
ln(Estimate)			-.046
Standardized Error of ln(Estimate)			.030
Asymptotic Significance (2-sided)			.119
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.901
		Upper Bound	1.012
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	-.105
		Upper Bound	.012

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

- Faktor Kendala Infrastruktur

## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Infrastruktur * Prospek_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

### Infrastruktur \* Prospek\_Usaha Crosstabulation

Count

		Prospek_Usaha		Total
		.00	1.00	
Infrastruktur	.00	34068	99164	133232
	1.00	3238	11228	14466
Total		37306	110392	147698

### Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

### Tests of Conditional Independence

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	70.203	1	.000
Mantel-Haenszel	70.034	1	.000

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

### Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate				1.191
In(Estimate)				.175
Standardized Error of In(Estimate)				.021
Asymptotic Significance (2-sided)				.000
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound		1.143
		Upper Bound		1.241
	In(Common Odds Ratio)	Lower Bound		.134
		Upper Bound		.216

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

- **Faktor Kendala Permodalan**

### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Permodalan * Prospek_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

#### Permodalan \* Prospek\_Usaha Crosstabulation

Count

	Prospek_Usaha	Total	
		.00	1.00
Permodalan .00	20833	61082	81915
1.00	16473	49310	65783
Total	37306	110392	147698

#### Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

### Tests of Conditional Independence

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	2.955	1	.086
Mantel-Haenszel	2.934	1	.087

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

### Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate			1.021
ln(Estimate)			.021
Standardized Error of ln(Estimate)			.012
Asymptotic Significance (2-sided)			.086
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	.997
		Upper Bound	1.045
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	-.003
		Upper Bound	.044

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

- Faktor Kendala Pemasaran**

### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pemasaran * Prospek_Usaha	147698	100.0%	0	0.0%	147698	100.0%

#### Pemasaran \* Prospek\_Usaha Crosstabulation

Count

		Prospek_Usaha		Total
		.00	1.00	
Pemasaran	.00	26704	88569	115273
	1.00	10602	21823	32425
Total		37306	110392	147698

**Tests of Homogeneity of the Odds Ratio**

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

**Tests of Conditional Independence**

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	1217.737	1	.000
Mantel-Haenszel	1217.224	1	.000

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

**Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate**

Estimate				.621
ln(Estimate)				-.477
Standardized Error of ln(Estimate)				.014
Asymptotic Significance (2-sided)				.000
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound		.604
		Upper Bound		.638
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound		-.504
		Upper Bound		-.450

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1.000 assumption. So is the natural log of the estimate.

## Lampiran 1

Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Tahun Mulai Beroperasi Secara  
Komersial Usaha/Perusahaan di Provinsi Maluku

Lapangan Usaha	< 2001	2001 - 2005	2006 - 2010	2011 - 2015	2016	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B	123	189	249	775	26	1.362
C	15.831	6.245	6.906	7.705	623	37.310
D	1	6	15	70	8	100
E	27	40	72	142	13	294
F	652	378	364	318	29	1.741
G	8.130	7.715	13.880	29.143	2.612	61.480
H	1.307	1.986	3.892	6.146	308	13.639
I	2.549	1.909	3.828	7.923	908	17.117
J	13	139	614	2.814	348	3.928
K	25	52	95	206	19	397
L	70	73	126	358	52	679
M,N	82	125	369	892	68	1.536
P	2.351	467	807	630	36	4.291
Q	222	113	151	229	36	751
R,S	406	371	756	1.349	191	3.073
<b>Maluku</b>	<b>31.789</b>	<b>19.808</b>	<b>32.124</b>	<b>58.700</b>	<b>5.277</b>	<b>147.698</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 2

**Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Provinsi Maluku,  
2017**

Kabupaten/Kota	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	68	7.604	8	4
Maluku Tenggara	19	789	6	13
Maluku Tengah	321	9.479	28	23
Buru	319	1.427	13	5
Kepulauan Aru	34	1.337	2	5
Seram Bagian Barat	252	5.445	20	0
Seram Bagian Timur	8	1.386	0	3
Maluku Barat Daya	141	3.150	7	15
Buru Selatan	8	2.454	0	0
Ambon	148	3.883	13	208
Tual	44	356	3	18
<b>Maluku</b>	<b>1.362</b>	<b>37.310</b>	<b>100</b>	<b>294</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	143	3.149	545	437
Maluku Tenggara	81	2.352	574	539
Maluku Tengah	441	15.303	4.148	4.617
Buru	86	6.498	662	1.548
Kepulauan Aru	38	2.148	331	510
Seram Bagian Barat	140	7.393	1.324	1.286
Seram Bagian Timur	116	3.242	375	688
Maluku Barat Daya	88	1.941	208	345
Buru Selatan	69	1.878	155	466
Ambon	515	14.979	4.830	6.055
Tual	24	2.597	487	626
<b>Maluku</b>	<b>1.741</b>	<b>61.480</b>	<b>13.639</b>	<b>17.117</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	J	K	L	M, N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	42	7	64	64
Maluku Tenggara	79	22	31	67
Maluku Tengah	1.065	109	120	348
Buru	280	24	26	174
Kepulauan Aru	42	11	33	43
Seram Bagian Barat	495	23	46	155
Seram Bagian Timur	123	6	27	51
Maluku Barat Daya	87	4	2	31
Buru Selatan	32	15	44	21
Ambon	1.579	151	250	532
Tual	104	25	36	50
<b>Maluku</b>	<b>3.928</b>	<b>397</b>	<b>679</b>	<b>1.536</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 2

Kabupaten/Kota	P	Q	R, S	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	299	58	142	12.634
Maluku Tenggara	363	33	85	5.053
Maluku Tengah	1.057	98	508	37.665
Buru	316	119	170	11.667
Kepulauan Aru	238	52	194	5.018
Seram Bagian Barat	476	72	178	17.305
Seram Bagian Timur	321	40	97	6.483
Maluku Barat Daya	281	23	115	6.438
Buru Selatan	233	34	51	5.460
Ambon	532	195	1.272	35.142
Tual	175	27	261	4.833
<b>Maluku</b>	<b>4.291</b>	<b>751</b>	<b>3.073</b>	<b>147.698</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 3

**Banyaknya Pekerja UMK menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha  
di Provinsi Maluku, 2017**

Kabupaten/Kota	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	151	14.242	16	8
Maluku Tenggara	55	1.573	21	26
Maluku Tengah	638	27.454	52	44
Buru	553	3.450	28	9
Kepulauan Aru	49	2.118	6	6
Seram Bagian Barat	933	14.074	31	0
Seram Bagian Timur	17	2.788	0	10
Maluku Barat Daya	279	5.025	24	50
Buru Selatan	26	6.922	0	0
Ambon	180	7.514	25	307
Tual	76	866	5	31
<b>Maluku</b>	<b>2.957</b>	<b>86.026</b>	<b>208</b>	<b>491</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 3

Kabupaten/Kota	F	G	H	I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	527	6.465	877	944
Maluku Tenggara	499	5.087	785	1.173
Maluku Tengah	3.082	33.537	5.366	8.604
Buru	839	11.288	930	2.732
Kepulauan Aru	302	4.165	388	869
Seram Bagian Barat	729	13.907	2.206	2.366
Seram Bagian Timur	545	6.889	474	1.543
Maluku Barat Daya	1.184	3.785	368	668
Buru Selatan	431	3.644	375	975
Ambon	5.136	28.568	5.856	12.096
Tual	147	4.851	498	1.016
<b>Maluku</b>	<b>13.421</b>	<b>122.186</b>	<b>18.123</b>	<b>32.986</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 3

Kabupaten/Kota	J	K	L	M, N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	72	41	112	142
Maluku Tenggara	134	78	46	165
Maluku Tengah	1.804	355	165	804
Buru	365	114	41	443
Kepulauan Aru	63	35	36	90
Seram Bagian Barat	822	66	55	366
Seram Bagian Timur	205	8	33	129
Maluku Barat Daya	167	8	8	58
Buru Selatan	54	45	66	54
Ambon	2.261	840	408	1.401
Tual	133	58	40	110
<b>Maluku</b>	<b>6.080</b>	<b>1.648</b>	<b>1.010</b>	<b>3.762</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 3

Kabupaten/Kota	p	Q	R, S	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	3.501	944	321	28.363
Maluku Tenggara	2.921	921	129	13.613
Maluku Tengah	11.565	1.719	886	96.075
Buru	3.507	640	256	25.195
Kepulauan Aru	2.566	920	317	11.930
Seram Bagian Barat	5.592	678	349	42.174
Seram Bagian Timur	3.407	304	257	16.609
Maluku Barat Daya	2.093	316	149	14.182
Buru Selatan	2.022	152	82	14.848
Ambon	9.119	704	2.357	76.772
Tual	1.976	542	425	10.774
<b>Maluku</b>	<b>48.269</b>	<b>7.840</b>	<b>5.528</b>	<b>350.535</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 4

**Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Badan Hukum di Provinsi Maluku, 2017**

Kabupaten/Kota	PT/PT Persero/Perum	CV	Firma	Koperasi/Dana Pensiun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	0	22	0	6
Maluku Tenggara	0	15	2	10
Maluku Tengah	0	75	0	57
Buru	3	60	0	10
Kepulauan Aru	0	26	0	6
Seram Bagian Barat	0	20	0	8
Seram Bagian Timur	0	24	2	22
Maluku Barat Daya	0	45	0	3
Buru Selatan	0	5	0	18
Ambon	9	374	7	122
Tual	0	6	0	16
<b>Maluku</b>	<b>12</b>	<b>672</b>	<b>11</b>	<b>278</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	Yayasan	Ijin Khusus dari Instansi	Perwakilan perusahaan/lembaga asing
(1)	(6)	(7)	(8)
Maluku Tenggara Barat	141	1.850	0
Maluku Tenggara	155	1.106	0
Maluku Tengah	207	4.792	0
Buru	69	1.829	0
Kepulauan Aru	70	964	0
Seram Bagian Barat	76	728	0
Seram Bagian Timur	30	1.253	0
Maluku Barat Daya	95	464	0
Buru Selatan	43	650	0
Ambon	209	4.340	0
Tual	24	1.099	0
<b>Maluku</b>	<b>1.119</b>	<b>19.075</b>	<b>0</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 4

Kabupaten/Kota	Tidak Berbadan Usaha	Jumlah
(1)	(9)	(10)
Maluku Tenggara Barat	10.615	12.634
Maluku Tenggara	3.765	5.053
Maluku Tengah	32.534	37.665
Buru	9.696	11.667
Kepulauan Aru	3.952	5.018
Seram Bagian Barat	16.473	17.305
Seram Bagian Timur	5.152	6.483
Maluku Barat Daya	5.831	6.438
Buru Selatan	4.744	5.460
Ambon	30.081	35.142
Tual	3.688	4.833
<b>Maluku</b>	<b>126.531</b>	<b>147.698</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 5

**Banyaknya UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Sistem Usaha di Provinsi Maluku, 2017**

Kategori	Waralaba	Multi Level Marketing	Konsinyasi	Konvensional	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. Pertambangan dan Penggalian	0	0	10	1.352	1.362
C. Industri Pengolahan	164	124	285	36.737	37.310
D. Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1	0	3	96	100
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	5	0	0	289	294
F. Konstruksi	5	25	15	1.696	1.741
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	293	163	155	60.869	61.480
H. Pengangkutan dan Pergudangan	42	36	25	13.536	13.639
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	63	72	23	16.959	17.117
J. Informasi dan Komunikasi	0	38	27	3.863	3.928
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	0	0	397	397
L. Real Estat	0	0	0	679	679
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis;	0	2	1	202	205

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

## Lanjutan Lampiran 5

Kategori (1)	Waralaba (2)	Multi Level Marketing (3)	Konsinyasi (4)	Konvensional (5)	Jumlah (6)
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;	0	0	0	1.331	1.331
P. Pendidikan	32	24	63	4.172	4.291
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	8	0	0	743	751
R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;	0	0	11	588	599
S. Aktivitas Jasa Lainnya	12	7	0	2.455	2.474
<b>Total</b>	<b>625</b>	<b>491</b>	<b>618</b>	<b>145.964</b>	<b>147.698</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan, data diolah

**Lampiran 6**  
**Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Komputer di Provinsi**  
**Maluku, 2016**

Kabupaten/Kota	Menggunakan Komputer	Tidak Menggunakan Komputer	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	476	12.158	12.634
Maluku Tenggara	380	4.673	5.053
Maluku Tengah	1.634	36.031	37.665
Buru	453	11.214	11.667
Kepulauan Aru	290	4.728	5.018
Seram Bagian Barat	613	16.692	17.305
Seram Bagian Timur	417	6.066	6.483
Maluku Barat Daya	319	6.119	6.438
Buru Selatan	218	5.242	5.460
Ambon	2.010	33.132	35.142
Tual	221	4.612	4.833
<b>Maluku</b>	<b>7.031</b>	<b>140.667</b>	<b>147.698</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 7

**Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Keperluan Menggunakan Internet di  
Provinsi Maluku, 2016**

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Tidak Menggunakan Internet	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	12.634	12.394	240
Maluku Tenggara	5.053	4.836	217
Maluku Tengah	37.665	35.305	2.360
Buru	11.667	11.150	517
Kepulauan Aru	5.018	4.854	164
Seram Bagian Barat	17.305	16.798	507
Seram Bagian Timur	6.483	6.079	404
Maluku Barat Daya	6.438	6.327	111
Buru Selatan	5.460	5.354	106
Ambon	35.142	32.988	2.154
Tual	4.833	4.667	166
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>140.752</b>	<b>6.946</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 7

Kabupaten/Kota	Keperluan Menggunakan Internet		
	Sarana Komunikasi	Mencari Informasi	Sarana Pemasraan/Iklan
(1)	(5)	(6)	(7)
Maluku Tenggara Barat	209	145	25
Maluku Tenggara	169	193	31
Maluku Tengah	1.942	1.500	426
Buru	353	474	47
Kepulauan Aru	128	126	30
Seram Bagian Barat	367	445	144
Seram Bagian Timur	258	320	65
Maluku Barat Daya	61	109	20
Buru Selatan	60	93	5
Ambon	1.738	1.680	856
Tual	109	139	50
<b>Maluku</b>	<b>5.394</b>	<b>5.224</b>	<b>1.699</b>

Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 7

Kabupaten/Kota	Keperluan Menggunakan Internet	
	Sarana Penjualan dan/atau Pembelian	Lainnya
(1)	(8)	(9)
Maluku Tenggara Barat	54	16
Maluku Tenggara	65	10
Maluku Tengah	590	89
Buru	140	87
Kepulauan Aru	61	19
Seram Bagian Barat	160	106
Seram Bagian Timur	133	4
Maluku Barat Daya	28	2
Buru Selatan	2	13
Ambon	980	165
Tual	56	5
<b>Maluku</b>	<b>2.269</b>	<b>516</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 8

## Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Perolehan Laba Tahun 2016

## Dibandingkan Tahun 2015 di Provinsi Maluku

Kategori	Meningkat	Tetap	Menurun	Tidak dapat dibandingkan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. Pertambangan dan Penggalian	273	446	504	139	1.362
C. Industri Pengolahan	13.852	13.780	6.196	3.482	37.310
D. Pengadaan Listrik Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	37	32	18	13	100
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	52	164	55	23	294
F. Konstruksi	569	700	352	120	1.741
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	18.169	22.496	14.888	5.927	61.480
H. Pengangkutan dan Pergudangan	2.764	5.459	4.022	1.394	13.639
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.983	6.767	3.317	2.050	17.117
J. Informasi dan Komunikasi	1.294	1.393	573	668	3.928
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	141	110	105	41	397
L. Real Estat	135	428	41	75	679
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis;	59	71	63	12	205

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 8

Kategori	Meningkat	Tetap	Menurun	Tidak dapat dibandingkan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;	407	504	292	128	1.331
P. Pendidikan	1.288	2.038	453	512	4.291
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	249	262	77	163	751
R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;	159	184	152	104	599
S. Aktivitas Jasa Lainnya	601	737	830	306	2.474
<b>Total</b>	<b>45.032</b>	<b>55.571</b>	<b>31.938</b>	<b>15.157</b>	<b>147.698</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Lampiran 9**  
**Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kemitraan di Provinsi Maluku,**  
**2016**

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Tidak Menjaln Kemitraan	Menjaln Kemitraan
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	12.634	12.244	390
Maluku Tenggara	5.053	4.939	114
Maluku Tengah	37.665	35.305	2.360
Buru	11.667	11.107	560
Kepulauan Aru	5.018	4.906	112
Seram Bagian Barat	17.305	15.771	1.534
Seram Bagian Timur	6.483	6.091	392
Maluku Barat Daya	6.438	6.170	268
Buru Selatan	5.460	5.215	245
Ambon	35.142	32.722	2.420
Tual	4.833	4.738	95
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>139.208</b>	<b>8.490</b>

Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 9

Kabupaten/Kota	Jenis Kemitraan		
	Penyediaan Uang/Barang Modal	Pengadaan Bahan Baku/Barang Dagangan	Pemasaran
(1)	(5)	(6)	(7)
Maluku Tenggara Barat	124	315	3
Maluku Tenggara	41	63	28
Maluku Tengah	547	1.529	455
Buru	159	359	116
Kepulauan Aru	48	40	36
Seram Bagian Barat	453	741	375
Seram Bagian Timur	115	337	15
Maluku Barat Daya	8	143	104
Buru Selatan	99	127	53
Ambon	543	1.741	553
Tual	22	64	10
<b>Maluku</b>	<b>2.159</b>	<b>5.459</b>	<b>1.748</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 9

Kabupaten/Kota	Jenis Kemitraan	
	Bimbingan/ Pelatihan/ Penyuluhan	Lainnya
(1)	(8)	(9)
Maluku Tenggara Barat	40	0
Maluku Tenggara	17	6
Maluku Tengah	178	71
Buru	66	15
Kepulauan Aru	7	8
Seram Bagian Barat	126	22
Seram Bagian Timur	27	11
Maluku Barat Daya	33	0
Buru Selatan	32	11
Ambon	144	110
Tual	13	0
<b>Maluku</b>	<b>683</b>	<b>254</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 10

## Banyaknya UMK dan Pekerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2017

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Banyaknya Pekerja		
		Banyaknya Pekerja Dibayar	Banyaknya Pekerja Tidak Dibayar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Tenggara Barat	12.634	7.086	21.277	28.363
Maluku Tenggara	5.053	6.031	7.582	13.613
Maluku Tengah	37.665	34.537	61.538	96.075
Buru	11.667	9.527	15.668	25.195
Kepulauan Aru	5.018	5.725	6.205	11.930
Seram Bagian Barat	17.305	15.386	26.788	42.174
Seram Bagian Timur	6.483	6.193	10.416	16.609
Maluku Barat Daya	6.438	5.125	9.057	14.182
Buru Selatan	5.460	4.890	9.958	14.848
Ambon	35.142	31.484	45.288	76.772
Tual	4.833	4.128	6.646	10.774
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>130.112</b>	<b>220.423</b>	<b>350.535</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 11

## Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerja di Provinsi Maluku, 2017

Kabupaten/Kota	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian	Outsourcing
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	17.281	1.188	10
Maluku Tenggara	9.457	575	4
Maluku Tengah	55.195	10.450	29
Buru	17.437	1.798	13
Kepulauan Aru	9.334	547	0
Seram Bagian Barat	24.632	4.992	12
Seram Bagian Timur	9.556	2.131	0
Maluku Barat Daya	9.580	1.177	0
Buru Selatan	8.059	1.337	0
Ambon	53.365	7.099	32
Tual	8.049	274	0
<b>Maluku</b>	<b>221.945</b>	<b>31.568</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 11

Kabupaten/Kota	Asing	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	0	9.884	28.363
Maluku Tenggara	0	3.577	13.613
Maluku Tengah	0	30.401	96.075
Buru	0	5.947	25.195
Kepulauan Aru	0	2.049	11.930
Seram Bagian Barat	0	12.538	42.174
Seram Bagian Timur	0	4.922	16.609
Maluku Barat Daya	0	3.425	14.182
Buru Selatan	0	5.452	14.848
Ambon	0	16.276	76.772
Tual	0	2.451	10.774
<b>Maluku</b>	<b>0</b>	<b>96.922</b>	<b>350.535</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Lampiran 12**  
**Banyaknya Pengusaha UMK menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi**  
**Maluku, 2017**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	10.083	2.551	12.634
Maluku Tenggara	2.627	2.426	5.053
Maluku Tengah	19.658	18.007	37.665
Buru	5.668	5.999	11.667
Kepulauan Aru	3.189	1.829	5.018
Seram Bagian Barat	9.693	7.612	17.305
Seram Bagian Timur	3.682	2.801	6.483
Maluku Barat Daya	5.162	1.276	6.438
Buru Selatan	4.211	1.249	5.460
Ambon	17.425	17.717	35.142
Tual	2.530	2.303	4.833
<b>Maluku</b>	<b>83.928</b>	<b>63.770</b>	<b>147.698</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 13

**Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang  
Ditamatkan Pengusaha/Penanggungjawab di Provinsi Maluku, 2017**

Kabupaten/Kota	Tidak Tamat SD	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	780	3.538	3.820
Maluku Tenggara	293	902	1.027
Maluku Tengah	2.572	9.479	7.385
Buru	1.603	2.606	2.446
Kepulauan Aru	577	1.554	899
Seram Bagian Barat	1.582	5.266	3.477
Seram Bagian Timur	1.240	1.633	1.412
Maluku Barat Daya	452	2.534	1.303
Buru Selatan	1.004	1.953	908
Ambon	1.470	4.184	5.877
Tual	229	932	895
<b>Maluku</b>	<b>11.802</b>	<b>34.581</b>	<b>29.449</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 13

Kabupaten/Kota	SMA/Madrasah Aliyah/Paket C	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Diploma I/II/III
(1)	(5)	(6)	(7)
Maluku Tenggara Barat	3.475	307	206
Maluku Tenggara	1.701	290	171
Maluku Tengah	13.236	1.121	748
Buru	3.659	98	215
Kepulauan Aru	1.334	66	109
Seram Bagian Barat	4.943	193	604
Seram Bagian Timur	1.530	50	245
Maluku Barat Daya	1.507	160	125
Buru Selatan	933	57	79
Ambon	16.762	1.691	831
Tual	1.949	145	124
<b>Maluku</b>	<b>51.029</b>	<b>4.178</b>	<b>3.457</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 13

Kabupaten/Kota	Diploma IV/S1	S2/S3	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)
Maluku Tenggara Barat	471	37	12.634
Maluku Tenggara	622	47	5.053
Maluku Tengah	3.006	118	37.665
Buru	915	125	11.667
Kepulauan Aru	470	9	5.018
Seram Bagian Barat	1.182	58	17.305
Seram Bagian Timur	368	5	6.483
Maluku Barat Daya	342	15	6.438
Buru Selatan	516	10	5.460
Ambon	3.992	335	35.142
Tual	500	59	4.833
<b>Maluku</b>	<b>12.384</b>	<b>818</b>	<b>147.698</b>

Sumber: BPS,SE2016-Lanjutan

## Lampiran 14

**Banyaknya UMK yang Pekerjaanya Pernah/ Sedang Mengikuti Pelatihan/ Penyuluhan  
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pelatihan di Provinsi Maluku, 2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah	Tidak Pernah Mengikuti Pelatihan/ Penyuluhan	Pernah Mengikuti Pelatihan/ Penyuluhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	12.634	12.354	280
Maluku Tenggara	5.053	4.684	369
Maluku Tengah	37.665	36.402	1.263
Buru	11.667	11.313	354
Kepulauan Aru	5.018	4.758	260
Seram Bagian Barat	17.305	16.481	824
Seram Bagian Timur	6.483	6.048	435
Maluku Barat Daya	6.438	6.265	173
Buru Selatan	5.460	5.284	176
Ambon	35.142	33.542	1.600
Tual	4.833	4.668	165
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>141.799</b>	<b>5.899</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 14

Kabupaten/Kota	Jenis Pelatihan/Penyuluhan			
	Manajerial	Ketrampilan/Teknik Produksi	Pemasaran	Pemasaran
(1)	(1)	(5)	(6)	(7)
Maluku Tenggara Barat	124	315	3	78
Maluku Tenggara	41	63	28	65
Maluku Tengah	547	1.529	455	337
Buru	159	359	116	88
Kepulauan Aru	48	40	36	6
Seram Bagian Barat	453	741	375	244
Seram Bagian Timur	115	337	15	113
Maluku Barat Daya	8	143	104	65
Buru Selatan	99	127	53	90
Ambon	543	1.741	553	427
Tual	22	64	10	38
<b>Maluku</b>	<b>2.159</b>	<b>5.459</b>	<b>1.748</b>	<b>1.551</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 15

**Banyaknya UMK menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan di Provinsi Maluku, 2017**

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Pernah Menerima	Tidak Pernah Menerima
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	12.634	729	11.905
Maluku Tenggara	5.053	702	4.351
Maluku Tengah	37.665	4.350	33.315
Buru	11.667	1.439	10.228
Kepulauan Aru	5.018	522	4.496
Seram Bagian Barat	17.305	1.538	15.767
Seram Bagian Timur	6.483	715	5.768
Maluku Barat Daya	6.438	590	5.848
Buru Selatan	5.460	383	5.077
Ambon	35.142	2.594	32.548
Tual	4.833	891	3.942
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>14.453</b>	<b>133.245</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 15

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit		
	Tidak Tahu Prosedur	Prosedur Sulit	Tidak Ada Agunan
(1)	(5)	(6)	(7)
Maluku Tenggara Barat	2.741	326	2.078
Maluku Tenggara	425	202	283
Maluku Tengah	6.637	1.959	3.651
Buru	1.127	1.122	1.711
Kepulauan Aru	708	512	389
Seram Bagian Barat	3.861	1.157	845
Seram Bagian Timur	1.794	585	741
Maluku Barat Daya	1.860	455	1.084
Buru Selatan	2.294	352	230
Ambon	3.917	3.473	1.152
Tual	374	295	410
<b>Maluku</b>	<b>25.738</b>	<b>10.438</b>	<b>12.574</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 15

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit		
	Suku Bunga Tinggi	Usulan Ditolak	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)
Maluku Tenggara Barat	2.725	118	3.917
Maluku Tenggara	742	111	2.588
Maluku Tengah	3.943	572	16.553
Buru	1.068	94	5.106
Kepulauan Aru	511	41	2.335
Seram Bagian Barat	3.888	164	5.852
Seram Bagian Timur	369	67	2.212
Maluku Barat Daya	586	94	1.769
Buru Selatan	268	39	1.894
Ambon	7.479	1.476	15.051
Tual	846	52	1.965
<b>Maluku</b>	<b>22.425</b>	<b>2.828</b>	<b>59.242</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 16

**Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan di Provinsi Maluku, 2016**

Lapangan Usaha	Banyaknya USaha	Pernah Menerima	Tidak Pernah Menerima
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	1.362	6	1.356
C. Industri Pengolahan	37.310	1.381	35.929
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	100	6	94
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	294	13	281
F. Konstruksi	1.741	79	1.662
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	61.480	9.713	51.767
H. Pengangkutan dan pergudangan	13.639	843	12.796
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	17.117	1.571	15.546
J. Informasi dan Komunikasi	3.928	193	3.735
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	397	40	357
L. Real Estat	679	39	640
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	1.536	212	72
P. Pendidikan	4.291	84	4.207
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	751	26	725
R, S. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; dan Aktivitas Jasa Lainnya	3.073	247	368
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>14.453</b>	<b>133.245</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 16

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit		
	Tidak Tahu Prosedur	Prosedur Sulit	Tidak Ada Anggungan
(1)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	334	96	216
C. Industri Pengolahan	11.253	2.582	4.242
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1	4	11
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	19	13	24
F. Konstruksi	198	106	202
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	8.371	4.471	4.660
H. Pengangkutan dan pergudangan	1.986	940	904
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.430	1.164	1.203
J. Informasi dan Komunikasi	423	409	336
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	19	12	38
L. Real Estat	55	46	31
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	73	120	231
P. Pendidikan	195	213	235
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	14	32	82
R, S. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; dan Aktivitas Jasa Lainnya	277	270	483
<b>Maluku</b>	<b>25.738</b>	<b>10.438</b>	<b>12.574</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 16

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit		
	Suku Bunga Tinggi	Usulan Ditolak	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)
B. Pertambangan dan Penggalan	161	75	474
C. Industri Pengolahan	4.479	408	12.965
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	14	2	62
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	105	7	113
F. Konstruksi	298	34	824
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	10.152	1.175	22.938
H. Pengangkutan dan pergudangan	2.604	363	5.999
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.647	405	7.697
J. Informasi dan Komunikasi	727	64	1.776
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	44	9	235
L. Real Estat	132	25	351
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	43	785	0
P. Pendidikan <i>Education</i>	271	142	3.151
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	77	15	505
R, S. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; dan Aktivitas Jasa Lainnya	61	1.367	0
<b>Maluku</b>	<b>22.425</b>	<b>2.828</b>	<b>59.242</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 17

**Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku  
(Persen), 2015-2018**

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan Penggalian	-0,97	3,91	0,21	-7,12
C. Industri Pengolahan	3,91	7,04	4,76	7,28
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	5,22	8,35	-2,48	4,69
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,55	4,07	5,43	3,53
F. Konstruksi	5,53	4,98	5,69	7,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	7,13	5,92	9,12	6,18
H. Pengangkutan dan Pergudangan	5,08	4,02	3,88	5,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7,74	-0,25	4,28	4,9
J. Informasi dan Komunikasi	9,02	7,91	6,08	5,18
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	7,29	9,22	4,34	7,08
L. Real Estat	2,84	2,26	2,68	2,26
M, N. Jasa Perusahaan	3,42	2,19	4,93	5,57
P. Pendidikan	7,84	7,97	5,62	6,57
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	4,86	5,53	4,41	5,52
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya				
<b>Maluku</b>	<b>5,48</b>	<b>5,73</b>	<b>5,82</b>	<b>5,94</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku

## Lampiran 18

**Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Prospek Usaha/Perusahaan pada Tahun  
2018 di Provinsi Maluku**

Lapangan Usaha	Lebih Baik	Sama Baik	Sama Buruk
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	462	214	41
C. Industri Pengolahan	17.368	9.931	707
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	57	28	1
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	165	76	8
F. Konstruksi	854	485	66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	29.674	16.694	2.255
H. Pengangkutan dan pergudangan	5.910	3.455	560
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	8.703	4.655	439
J. Informasi dan Komunikasi	2.113	1.043	36
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	255	95	12
L. Real Estat	248	306	2
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	115	48	3
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	638	415	25
P. Pendidikan	2.290	1.316	35
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	314	201	9
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	310	142	13
S. Aktivitas Jasa Lainnya	1.259	553	116
<b>Maluku</b>	<b>70.735</b>	<b>39.657</b>	<b>4.328</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 18

Lapangan Usaha	Lebih Buruk	Tidak Dapat Dibandingkan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	296	349	1.362
C. Industri Pengolahan	887	8.417	37.310
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	4	10	100
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	22	23	294
F. Konstruksi	46	290	1.741
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	2.540	10.317	61.480
H. Pengangkutan dan pergudangan	812	2.902	13.639
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	611	2.709	17.117
J. Informasi dan Komunikasi	64	672	3.928
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	17	18	397
L. Real Estat	21	102	679
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	13	26	205
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	61	192	1.331
P. Pendidikan	54	596	4.291
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	27	200	751
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	53	81	599
S. Aktivitas Jasa Lainnya	126	420	2.474
<b>Maluku</b>	<b>5.654</b>	<b>27.324</b>	<b>147.698</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 19

**Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Rencana Pengembangan/Perluasan  
Usaha/Perusahaan di Provinsi Maluku, 2017**

Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha	Tidak Ada Rencana	Ada Rencana
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	1362	1.224	138
C. Industri Pengolahan	37.310	24.074	13.236
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	100	66	34
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	294	208	86
F. Konstruksi	1.741	1.106	635
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	61.480	33.396	28.084
H. Pengangkutan dan pergudangan	13.639	10.004	3.635
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	17.117	9.480	7.637
J. Informasi dan Komunikasi	3.928	2.499	1.429
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	397	164	233
L. Real Estat	679	457	222
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	205	106	99
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	1.331	612	719
P. Pendidikan	4.291	1.671	2.620
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	751	362	389
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	599	324	275
S. Aktivitas Jasa Lainnya	2.474	1.383	1.091
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>87.136</b>	<b>60.562</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 19

Lapangan Usaha	Rencana Pengembangan/Perluasan Perusahaan		
	Memperluas Tempat Usaha	Membuka Cabang	Meningkatkan Keahlian
(1)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	83	0	84
C. Industri Pengolahan	11.066	1.074	2.284
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	24	9	6
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	48	21	16
F. Konstruksi	311	71	436
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	23.590	4.321	2.106
H. Pengangkutan dan pergudangan	1.514	325	304
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	6.464	1.239	887
J. Informasi dan Komunikasi	1.147	380	170
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	154	102	34
L. Real Estat	212	46	7
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	74	29	43
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	517	191	194
P. Pendidikan	1.931	143	1.558
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	277	76	241
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	207	51	32
S. Aktivitas Jasa Lainnya	881	353	430
<b>Maluku</b>	<b>48.500</b>	<b>8.431</b>	<b>8.832</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 19

Lapangan Usaha	Rencana Pengembangan/Perluasan Perusahaan	
	Diservikasi Produk	Lainnya
(1)	(8)	(9)
B. Pertambangan dan Penggalian	52	6
C. Industri Pengolahan	3.075	828
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	9	2
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	25	26
F. Konstruksi	113	63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	9.287	962
H. Pengangkutan dan pergudangan	536	1.705
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.464	330
J. Informasi dan Komunikasi	360	118
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	21	28
L. Real Estat	30	19
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	25	9
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	253	54
P. Pendidikan	160	402
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	86	31
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	53	12
S. Aktivitas Jasa Lainnya	231	47
<b>Maluku</b>	<b>16.780</b>	<b>4.642</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 20

**Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Alasan Utama Tidak Mempunyai Rencana Pengembangan/Perluasan Usaha/Perusahaan di Provinsi Maluku, 2017**

Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha	Ada Rencana	Tidak Ada Rencana
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	1362	138	1.224
C. Industri Pengolahan	37.310	13.236	24.074
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	100	34	66
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	294	86	208
F. Konstruksi	1.741	635	1.106
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	61.480	28.084	33.396
H. Pengangkutan dan pergudangan	13.639	3.635	10.004
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	17.117	7.637	9.480
J. Informasi dan Komunikasi	3.928	1.429	2.499
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	397	233	164
L. Real Estat	679	222	457
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	205	99	106
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	1.331	719	612
P. Pendidikan	4.291	2.620	1.671
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	751	389	362
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	599	275	324
S. Aktivitas Jasa Lainnya	2.474	1.091	1.383
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>60.562</b>	<b>87.136</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 20

Lapangan Usaha	Alasan Utama Tidak Mempunyai Rencana Pengembangan/Perluasan Perusahaan		
	Kekurangan Modal	Kesulitan Pemasaran	Kurang Keahlian
(1)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	445	393	67
C. Industri Pengolahan	10.454	4.571	1.378
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	20	11	5
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	61	20	22
F. Konstruksi	379	196	150
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	18.404	5.328	940
H. Pengangkutan dan pergudangan	4.732	1.137	466
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.552	1.407	368
J. Informasi dan Komunikasi	1.188	328	84
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	70	19	11
L. Real Estat	175	16	28
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	24	18	15
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	210	143	21
P. Pendidikan	327	57	151
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	59	7	28
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	88	87	9
S. Aktivitas Jasa Lainnya	568	134	196
<b>Maluku</b>	<b>41.756</b>	<b>13.872</b>	<b>3.939</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 20

Lapangan Usaha	Alasan Utama Tidak Mempunyai Rencana Pengembangan/Perluasan Perusahaan
	Lainnya
(1)	(8)
B. Pertambangan dan Penggalan	319
C. Industri Pengolahan	7.671
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	30
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	105
F. Konstruksi	381
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	8.724
H. Pengangkutan dan pergudangan	3.669
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.153
J. Informasi dan Komunikasi	899
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	64
L. Real Estat	238
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	49
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	238
P. Pendidikan	1.136
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	268
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	140
S. Aktivitas Jasa Lainnya	485
<b>Maluku</b>	<b>27.569</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 21

**Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kendala Usaha/Perusahaan di  
Provinsi Maluku, 2016**

Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha	Tidak Ada Kendala	Ada Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	1.362	262	1100
C. Industri Pengolahan	37.310	8588	28722
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	100	32	68
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	294	72	222
F. Konstruksi	1.741	523	1218
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	61.480	12048	49432
H. Pengangkutan dan pergudangan	13.639	3344	10295
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	17.117	5158	11959
J. Informasi dan Komunikasi	3.928	1182	2746
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	397	118	279
L. Real Estat	679	439	240
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	205	67	138
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	1.331	400	931
P. Pendidikan	4.291	1576	2715
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	751	306	445
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	599	244	355
S. Aktivitas Jasa Lainnya	2.474	655	1819
<b>Maluku</b>	<b>147.698</b>	<b>35014</b>	<b>112684</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 21

Lapangan Usaha	Jenis Kendala Perusahaan		
	Permodalan/ Likuiditas	Bahan Baku/ Barang Dagangan	Pemasaran
(1)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	392	458	428
C. Industri Pengolahan	14.724	7.573	9.386
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	31	1	16
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	65	27	43
F. Konstruksi	558	241	276
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	33.392	11.060	15.235
H. Pengangkutan dan pergudangan	4.304	309	2.271
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7.595	2.115	3.172
J. Informasi dan Komunikasi	1.694	227	558
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	177	10	80
L. Real Estat	157	18	28
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	63	28	30
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	482	123	340
P. Pendidikan	858	324	21
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	87	125	15
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	184	59	104
S. Aktivitas Jasa Lainnya	1.020	509	422
<b>Maluku</b>	<b>65.783</b>	<b>23.207</b>	<b>32.425</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 21

Lapangan Usaha	Jenis Kendala Perusahaan		
	Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Energi	Infrastruktur	Tenaga Kerja
(1)	(8)	(9)	(10)
B. Pertambangan dan Penggalian	10	177	53
C. Industri Pengolahan	2.065	4.940	2.050
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	8	11	9
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	12	24	18
F. Konstruksi	17	63	149
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	1.726	5.514	1.640
H. Pengangkutan dan perdagangan	1.404	1.149	151
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	625	689	430
J. Informasi dan Komunikasi	33	210	38
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	12	45
L. Real Estat	2	30	0
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	0	6	13
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	29	108	104
P. Pendidikan	106	1.228	1.585
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	52	216	203
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	24	2	19
S. Aktivitas Jasa Lainnya	20	87	155
<b>Maluku</b>	<b>6.133</b>	<b>14.466</b>	<b>6.662</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 21

Lapangan Usaha	Jenis Kendala Perusahaan		
	Peraturan dan Birokrasi Pemerintah	Pungutan Liar	Adanya Pesaing
(1)	(11)	(12)	(13)
B. Pertambangan dan Penggalian	44	17	302
C. Industri Pengolahan	603	139	7.345
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	6	0	31
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	11	1	138
F. Konstruksi	93	28	599
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	1.015	758	25.852
H. Pengangkutan dan pergudangan	334	228	7.170
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	328	133	5.730
J. Informasi dan Komunikasi	50	1	1.469
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	9	0	82
L. Real Estat	0	5	72
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	14	0	80
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	18	11	532
P. Pendidikan	402	18	303
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	91	11	79
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	4	8	160
S. Aktivitas Jasa Lainnya	56	36	913
<b>Maluku</b>	<b>3.078</b>	<b>1.394</b>	<b>50.857</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lanjutan Lampiran 21

Lapangan Usaha (1)	Jenis Kendala Perusahaan
	Lainnya (14)
B. Pertambangan dan Penggalan	79
C. Industri Pengolahan	2.632
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	9
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	5
F. Konstruksi	56
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	1.266
H. Pengangkutan dan pergudangan	797
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	502
J. Informasi dan Komunikasi	167
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	40
L. Real Estat	25
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;	7
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	30
P. Pendidikan	383
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	55
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;	11
S. Aktivitas Jasa Lainnya	110
<b>Maluku</b>	<b>6.174</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

## Lampiran 22

**Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran di Provinsi Maluku (Persen),  
2015-2018**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,62	5,91	5,43	3,50
Pengeluaran Konsumsi LNPTR	5,12	8,33	4,86	6,27
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,59	2,57	2,23	4,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,75	7,32	6,14	8,62
Perubahan Inventori	-47,98	3,95	5,92	6,88
Ekspor Luar Negeri	-0,11	4,24	5,31	10,42
Impor Luar Negeri	6,00	4,21	3,02	4,94
<b>Maluku</b>	<b>5,48</b>	<b>5,73</b>	<b>5,82</b>	<b>5,94</b>

Sumber: BPS Provinsi Maluku

## Daftar Pustaka

- Bappenas. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019  
Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Bappenas, Jakarta
- Dierks, Paul A. (1997). What is EVA, and How Can It Help Your Company.  
Management Accounting Journals, page 52.
- Direktorat Kredit, BPR dan UMKM - Bank Indonesia. (2011). Kajian Akademik  
Kelayakan Pendirian Lembaga Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan  
Menengah di Indonesia
- Harjito, Agus., dan Martono. (2011). Manajemen Keuangan, Edisi dua. Ekonosia,  
Yogyakarta.
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG  
KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN  
MENENGAH
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. (2015). Profil  
Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kerjasama LPPI dan BI.
- Meryana, E. (2012, Maret 28). *Megapolitan Kompas*. Retrieved from  
Kompas.com:<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/28/11481062/cides.hadapi.Kenaikan.harga.bbm.umkm.sudah.teruji>
- Nutria, Haryo (2010, Desember). Pemanfaatan Internet Sebagai Sarana Akses  
Informasi di Indonesia. Universitas Indonesia, Depok.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008  
TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
- PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

s

Poernamasari, Dhonna W. (2015). Analisis Karakteristik Usaha Terhadap Aksesibilitas Pembiayaan Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Provinsi Jawa Timur. Jakarta

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. (2013). Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Perkembangan UMKM. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Jakarta

Rohandi, Mochamad M A. (2016). Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM di Industri Perbankan. Bandung

Sudoko, Isono, dkk (1995). Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati, Aditya Bakti, Bandung.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU**

Jl. Wolter Monginsidi – Passo, Passo, Baguala, Kota Ambon, Maluku 97232

Telepon (0911) 361320

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)

ISBN 978-602-6701-54-1



9 786026 701541